

**Studi untuk
Merumuskan Rencana Tata Ruang
Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)
di
Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia**

Laporan Final

Volume 1: Ringkasan

Pebruari 2011

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

**Value Planning International, Inc.
Oriental Consultants Co., Ltd.
Yachiyo Engineering Co., Ltd.**

INO
JR
11-003

**Studi untuk
Merumuskan Rencana Tata Ruang
Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)
di
Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia**

Laporan Final

Volume 1: Ringkasan

Pebruari 2011

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

**Value Planning International, Inc.
Oriental Consultants Co., Ltd.
Yachiyo Engineering Co., Ltd.**

USD1.0 = Rp. 9,000

JPY1.0 = Rp. 102

USD 1.0 = JYN 88.2

(Nilai Tukar Mata Uang bulan September 2010)

PENGANTAR

Menanggapi permintaan dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang memutuskan untuk melakukan penelitian tentang "Studi untuk Merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia", yang dipercayakan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

JICA menyeleksi dan mengirimkan sebuah tim studi yang dipimpin oleh Dr. Katsuhide Nagayama dari Value Planning International, Inc. yang bekerja antara bulan Mei 2009 hingga Desember 2010. Tim studi terdiri dari Value Planning International, Inc., Oriental Consultants Co., Ltd. dan Yachiyo Engineering Co., Ltd.

Dalam kurun kegiatannya, tim ini melakukan diskusi dengan pejabat-pejabat terkait dari Pemerintah Indonesia, dan survei lapangan yang dilakukan di daerah studi. Setelah kembali ke Jepang, tim ini melakukan studi lebih lanjut dan menyiapkan laporan akhir.

Kami berharap bahwa laporan ini akan memberikan kontribusi terhadap proses legal untuk persetujuan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan untuk peningkatan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Akhirnya, kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada para pejabat terkait dari Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya yang erat untuk mendukung studi ini.

Pebruari 2011

Motofumi Kohara
Chief Representative
Indonesia Office
Japan International Cooperation Agency

Pebruari 2011

Motofumi Kohara
Chief Representative
Indonesia Office
Japan International Cooperation Agency

Dengan hormat,

Perihal: Surat Pengiriman

Dengan rasa gembira dengan ini Kami secara resmi menyerahkan laporan akhir Studi untuk Merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan Gerbangkertosusila (GKS) di Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia.

Laporan ini mengkompilasi hasil studi yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun di Jepang sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2010 oleh Tim yang terdiri dari Value Planning International, Inc., in corporation with Oriental Consultants Co., Ltd., dan Yachiyo Engineering. CO., Ltd.

Kami sangat menghargai banyak pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian yang intensif, penyelidikan dan diskusi dalam rangka penelitian. Kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus khusus untuk mereka yang memberikan bantuan yang luas dan kerjasama dengan tim studi, khususnya kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

Kami juga sangat menghargai atas bantuan personel program ini pada lembaga Anda, JICA Indonesia Office, dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia atas dukungan mereka yang baik dan nasihat yang berharga dalam perjalanan Studi ini.

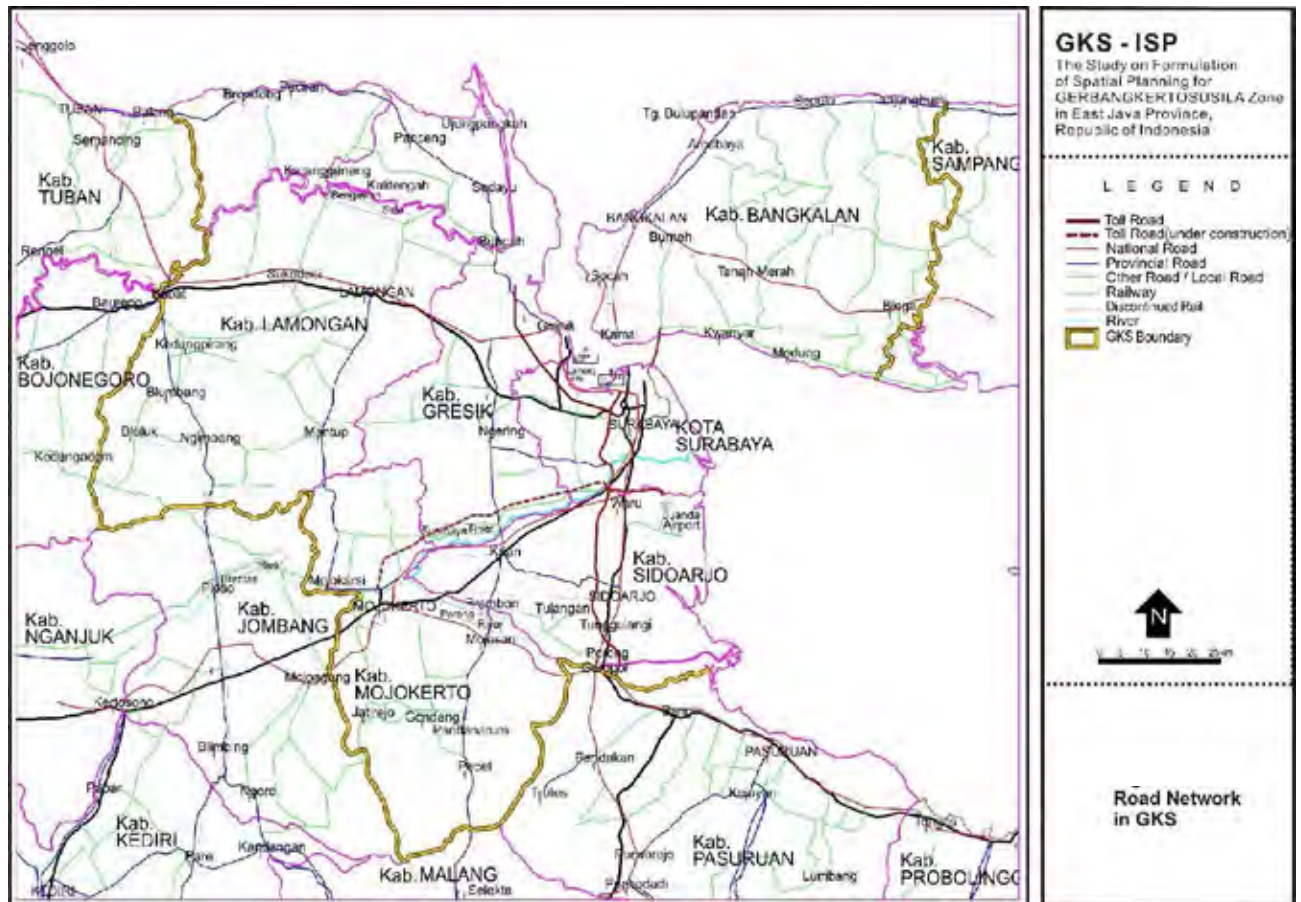
Kami berharap laporan ini akan berkontribusi pada pembangunan jangka panjang untuk Kawasan GKS yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan lingkungan yang seimbang sebagai pelopor ekonomi terkemuka terbesar kedua di Indonesia.

Hormat Kami,

Katsuhide NAGAYAMA, Ph.D.

Team Leader

Studi untuk Merumuskan Tata Ruang Kawasan
GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Provinsi
Jawa Timur, Republik Indonesia



Peta Wilayah Studi

C08 GKS Spatial Plan 2030

Legend

Land Use Plan (2030)

- Protected area
- Conservation area
- Agriculture (Irrigated)
- Agriculture
- Protected Forest
- Production Forest
- Conservation Forest
- Buffer
- Urban Development area (high)
- Urban Development area (mid)
- Urban Development area (low)
- Kampong
- Industrial area
- Spacial Zone (Military)

Proposed Environmental Sensitive Zone

- Mangrove Ecosystem

Land Stability

- Preservation Zone
- Conservation Zone
- Restoration Zone

Forest Ecosystem

- Preservation zone
- Conservation zone
- Restoration zone

Strategic Projects

- Project Identified by GKS-ISP
- Commercial area
- Green Area
- Public Facilities
- Industrial Zone
- Military Zone
- Other Strategic Projects

Urban Center

- Regional Center
- GKS Sub-Centers
- SMA Level Centers
- SMA Sub-Centers
- GKS Kab.Centers
- Other Kab.Sub-Centers
- Intermodal Gateway

Road Network

- Toll
- Arterial
- Collector
- Secondary Arterial
- Local
- Ferry

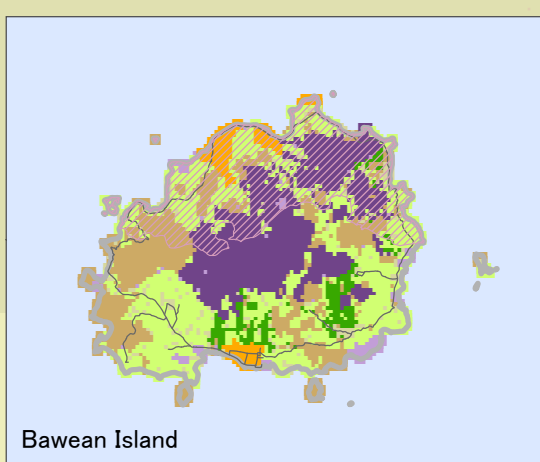
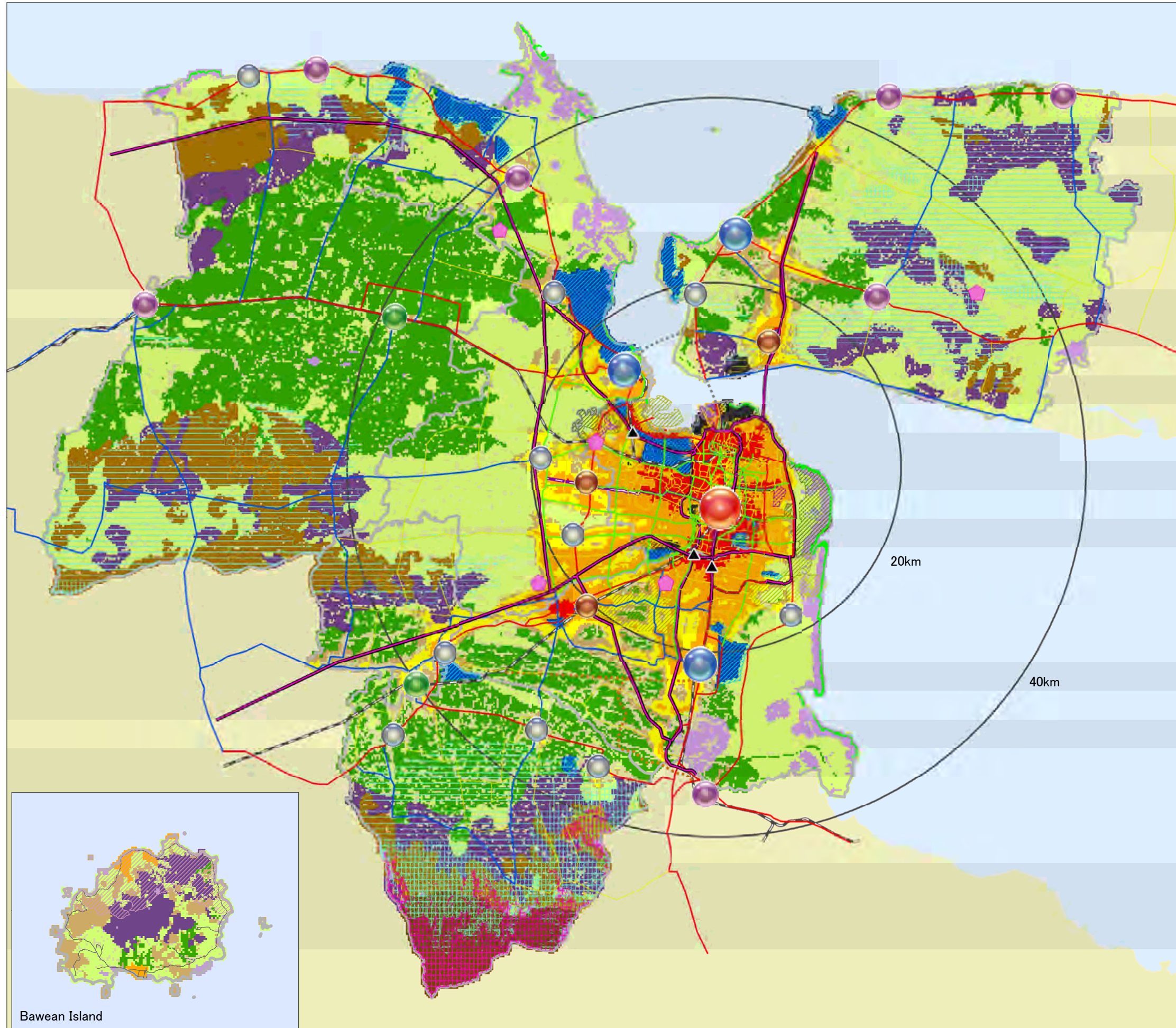
Railway

- Proposed Railway Network (Passenger)
- Freight SProposed Railway Network (freight)
- Railway (under Construction)
- New Mass Transit Corridor (NMTC)

0 5 10 20 30km



GKS-ISP
The Study on
Formulation of Spatial Planning
for GKS Zone



**Studi Untuk
Memformulasikan Rencana Tata Ruang
Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)
Provinsi Jawa Timur,
Republik Indonesia**

**Laporan Akhir
Ringkasan
Daftar Isi**

Pendahuluan
Peta
Daftar Isi
Daftar Gambar dan Tabel
Singkatan dan Akronim

1. PENGANTAR

1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Tujuan Studi	1-1
1.3	Visi dan Misi	1-2
1.3.1	Visi	1-2
1.3.2	Misi/Tujuan	1-2
1.4	Strategi Pembangunan Utama GKS.....	1-3
1.5	Tujuan Perencanaan Tata Ruang Kawasan GKS.....	1-4
1.6	Relevant Basic Laws and Regulations	1-5

2. ISU PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT

2.1	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Nasional	2-1
2.1.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	2-1
2.1.2	Impelementasi Arah dan Strategi Perencanaan Tata Ruang	2-1
2.2	Arahan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang Jawa-Bali.....	2-3
2.3	Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Jawa Timur	2-4
2.4	Analisis SWOT GKS.....	2-7
2.5	Fungsi dan Peran GKS	2-8
2.6	Isu-isu Pembangunan, Kebijakan dan Strategi untuk Rencana Tata Ruang GKS	2-9
2.6.1	Pembangunan Sosial dan Ekonomi Regional	2-9
2.6.2	Pembangunan Struktur Tata Ruang	2-10
2.6.3	Pembangunan Transportasi	2-11
2.6.4	Pembangunan Prasarana untuk Pengelolaan Air dan Sarana Utilitas	2-13
2.6.5	Pengelolaan Lingkungan.....	2-16

3. KERANGKA KEJA SOSIOEKONOMI PENATAAN RUANG UNTUK KAWASAN GKS 2030

3.1	Proyeksi Populasi Penduduk.....	3-1
3.1.1	Alternatif Skenario Pertumbuhan	3-1
3.1.2	Kerangka Kerja Populasi.....	3-1
3.2	Skenario Pengembangan Ekonomi.....	3-2

3.2.1	Kerangka Kerja Nasional dan Regional	3-2
3.2.2	Kerangka Kerja Ekonomi GKS: Angka Pertumbuhan dan PDRB pada Harga Konstan (Tahun 2000).....	3-2
3.2.3	Pertumbuhan PDRB per Kapita di Kawasan GKS	3-3
3.2.4	Keterkaitan Kerangka Kerja Penataan Ruang	3-3

4. STRUKTUR RUANG KAWASAN GKS

4.1	Sistem Perkotaan	4-1
4.1.1	Review RTRW Provinsi Jawa Timur.....	4-1
4.1.2	Usulan Sistem Hirarki Perkotaan	4-5
4.1.3	Strategi Pembangunan Perkotaan dan Pusat-pusat Fungsional	4-9
4.1.4	Hubungan Perkotaan dan Perdesaan.....	4-10
4.2	Jaringan Transportasi.....	4-12
4.2.1	Skenario Permintaan Terhadap Transportasi	4-12
4.2.2	Pengembangan Jalan	4-15
4.2.3	Pengembangan Angkutan Umum	4-27
4.2.4	Pengembangan Angkutan Laut dan Pelabuhan.....	4-36
4.2.5	Pengembangan Bandara	4-39
4.2.6	Sistem Angkutan Barang.....	4-43
4.3	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sistem Suplai Air	4-49
4.3.1	Skenario Kebutuhan Air	4-49
4.3.2	Kapasitas Sumber Air.....	4-51
4.3.3	Pengelolaan Sumber Daya Air	4-52
4.3.4	Pelayanan Suplai Air	4-53
4.3.5	Stratrgi dan Prioritas Penanganan Sistem Suplai Air	4-55
4.4	Pengolahan Air Limbah dan Drainase Perkotaan.....	4-57
4.4.1	Kondisi Saat Ini	4-57
4.4.2	Pengelolaan Air Limbah dan Drainase.....	4-58
4.4.3	Strategi dan Prioritas Implementasi untuk Air Limbah dan Drainase Perkotaan ...	4-58
4.5	Sistem Suplai Energi Listrik.....	4-60
4.5.1	Kebutuhan Saat Ini	4-60
4.5.2	Kebutuhan Akan Datang	4-61
4.5.3	Rencana yang Ada untuk Peningkatan Kapasitas	4-61
4.5.4	Keseimbangan antara Kapasitas Pasokan dan Permintaan	4-63
4.5.5	Implementasi Strategis dan Prioritas	4-64
4.6	Telekomunikasi.....	4-65
4.6.1	Situasi saat ini.....	4-65
4.6.2	Strategi Pembangunan	4-65
4.7	Manajemen Persampahan	4-67
4.7.1	Situasi Saat Ini	4-67
4.7.2	Rencana Kebutuhan Lahan TPA.....	4-68
4.7.3	Strategi dan Prioritas Implementasi Pengelolaan Sampah.....	4-71

5. POLA TATA RUANG DI KAWASAN GKS

5.1	Evaluasi Penggunaan Lahan untuk Analisa Daya Dukung Tata Ruang	5-1
5.1.1	Metodologi dan Tujuan dari Analisa	5-1

5.1.2	Metodologi dari Analisa	5-1
5.1.3	Distribusi Lahan dengan Kendala (2009-2030).....	5-3
5.1.4	Distribusi Lahan dengan Potensi Pengembangan (2009 and 2030).....	5-4
5.1.5	Evaluasi Potensi Penggunaan Lahan secara Keseluruhan	5-4
5.2	Pengendalian Penggunaan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan.....	5-8
5.2.1	Langkah-langkah Pengendalian Penggunaan Lahan untuk Perlindungan Lingkungan	5-8
5.2.2	Strategi-strategi Pengelolaan Lingkungan	5-11
5.2.3	Pengelolaan Wilayah Lingkungan Sensitif	5-12
5.3	Skenario Urbanisasi dan <i>Demand</i> Penggunaan Lahan Perkotaan	5-14
5.3.1	<i>Demand</i> Penggunaan Lahan untuk Perumahan dan Wilayah Perkotaan.....	5-14
5.4	Rencana Penggunaan Lahan Tahun 2030 untuk Kawasan GKS.....	5-18
5.4.1	Metodologi	5-18
5.4.2	Usulan Rencana Penggunaan Lahan GKS 2030.....	5-20
5.5	Zona Pengembangan Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi	5-25
5.5.1	Definisi dan Proyek Zona Pengembangan Strategis.....	5-25
5.5.2	Penilaian terhadap Usulan Proyek Strategis.....	5-25
5.5.3	Usulan Zona Strategis sampai dengan Tahun 2030 di GKS	5-26
5.6	Rencana Tata Ruang Tahun 2030 untuk Kawasan GKS	5-30

6. ARAH PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG

6.1	Indikasi Program dan Proyek Pembangunan Kawasan GKS 2010-2030.....	6-1
6.2	Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6-9
6.2.1	Dasar Pemikiran	6-9
6.2.2	Kerangka Pengembangan Manajemen.....	6-9
6.3	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (<i>Strategic Environment Assessment</i>).....	6-10
6.3.1	Dasar Pemikiran KLHS	6-10
6.3.2	Metodologi	6-11
6.3.3	Hasil.....	6-13

7. KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN GKS

7.1	Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama Organisasi.....	7-1
7.1.1	Isu-isu Saat Ini	7-1
7.1.2	Dasar Hukum yang ada untuk Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintah	7-1
7.1.3	Pembentukan “Badan Kerjasama Pembangunan GKS”	7-2
7.2	Isu-isu Keuangan dalam Penggunaan Inisiatif Lokal.....	7-4
7.2.1	Isu-isu Saat Ini	7-4
7.2.2	Skema Pendanaan yang Ada.....	7-5
7.2.3	Usulan Langkah-langkah untuk Peningkatan Keuangan	7-5
7.3	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	7-6
7.3.1	Isu-isu Saat	7-6
7.3.2	Usulan Langkah-langkah untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.....	7-6

8. TINDAK LANJUT

LAMPIRAN

Dasar Hukum/Peraturan yang Terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS

Tabel	Halaman
Tabel 1.3.1	Misi/Tujuan Pembangunan Kawasan GKS pada Masa Depan 1-3
Tabel 2.1.1	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014)..... 2-2
Tabel 2.3.1	Visi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di GKS..... 2-5
Tabel 2.3.2	Misi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di GKS..... 2-5
Tabel 2.4.1	Analisis SWOT Kawasan GKS berdasarkan Evaluasi Keseluruhan..... 2-7
Tabel 3.2.1	Skenario Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 3-2
Tabel 3.2.2	Perbandingan dan Evaluasi dari Skenario-Skenario Alternatif 3-4
Tabel 4.1.1	Peran Kawasan GKS dalam Pengembangan Regional..... 4-3
Tabel 4.1.2	Ringkasan Arahkan Pembangunan yang direncanakan di dalam RTRW Provinsi Jawa Timur 4-4
Tabel 4.1.3	Peran dan Fungsi Pusat Perkotaan Utama di Kawasan GKS 4-6
Tabel 4.2.1	Perkiraan Jumlah Kendaraan yang Terdaftar di Masa Depan 4-12
Tabel 4.2.2	Perjalanan yang Diestimasikan di Masa Depan 4-13
Tabel 4.2.3	Ramalan Permintaan dan Viabilitas Rencana Jalan Tol..... 4-18
Tabel 4.2.4	Ramalan Permintaan di Jalan Tol Eksisting dan Rencana 4-19
Tabel 4.2.5	Permintaan Lalu Lintas ter-Revisi Mempertimbangkan Pengalihan keJalan Tol 4-20
Tabel 4.2.6	Daftar Proyek Pengembangan Jalan..... 4-24
Tabel 4.2.7	Cakupan Populasi oleh Angkutan Berbasis Rel 4-28
Tabel 4.2.8	Perkiraan Volume Penumpang..... 4-41
Tabel 4.3.1	Perkiraan Kebutuhan Total Air Non-Irigasi di Kawasan GKS 4-50
Tabel 4.3.2	Ketersediaan Air Permukaan di Kawasan GKS..... 4-51
Tabel 4.3.3	Kekurangan Air di GKS..... 4-53
Tabel 4.3.4	Prioritas Tindakan dalam Sistem Air Bersih 4-56
Tabel 4.4.1	Pembagian Tanggung Jawab Pencegahan Banjir..... 4-58
Tabel 4.4.2	Prioritas Implementasi untuk Pengolahan Air Limbah dan Drainase Perkotaan..... 4-59
Tabel 4.5.1	Pembangkit Listrik Eksisting di Pulau Jawa..... 4-61
Tabel 4.5.2	Rencana Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik 4-62
Tabel 4.5.3	Penambahan Jaringan Distribusi hingga Tahun 2019..... 4-62
Tabel 4.5.4	Implementasi Prioritas untuk Sektor Listrik di Jawa Timur (GKS) 4-64
Tabel 4.7.1	Timbulan Sampah Saat Ini di GKS..... 4-67
Tabel 4.7.2	Kapasitas Eksisting TPA dan Rencana untuk Pengembangan yad 4-68
Tabel 4.7.3	Produksi Kompos 4-68
Tabel 4.7.4	Perkiraan Masa Depan Timbulan Sampah di Kawasan GKS..... 4-68
Tabel 4.7.5	Target dengan Penerapan 3R di GKS..... 4-69
Tabel 4.7.6	Kebutuhan TPA dengan Langkah Perhitungan Intensif 3R 4-70
Tabel 4.7.7	Implementasi Prioritas untuk Pengelolaan Sampah di GKS..... 4-72
Tabel 5.1.1	Faktor-faktor Kendala untuk Evaluasi Lahan..... 5-2
Tabel 5.1.2	Faktor-faktor Potensi Pembangunan untuk Evaluasi Lahan..... 5-2
Tabel 5.1.3	Hasil Evaluasi Keseluruhan dari Potensi dan Kendala Penggunaan Lahan di Kawasan GKS..... 5-4
Tabel 5.3.1	Perkiraan Populasi dari Zone GKS Tahun 2030..... 5-14

Tabel 5.3.2	<i>Demand</i> Penggunaan Lahan untuk Perumahan dan Wilayah Pelayanan Perkotaan di GKS Tahun 2030	5-15
Tabel 5.3.3	Kenaikan Jumlah Pekerjaan pada Industri Formal (2007-2030) berdasarkan Ukuran Perusahaan	5-16
Tabel 5.3.4	<i>Demand</i> untuk Penambahan Lahan yang dibutuhkan oleh Sektor Industri sampai Tahun 2030.....	5-17
Tabel 5.4.1	Usulan Kategori <i>Zoning</i> Penggunaan Lahan untuk Perencanaan.....	5-19
Tabel 5.4.2	Struktur <i>Zoning</i> Penggunaan Lahan di GKS Tahun 2030	5-21
Tabel 5.4.3	Konversi Lahan Pertanian Irigasi dari Tahun 2009 sampai 2030	5-22
Tabel 5.4.4	Perubahan Penggunaan Lahan dari Pola <i>Eksisting</i> ke Rencana Penggunaan Lahan tahun 2030 di Kawasan GKS.....	5-22
Tabel 5.5.1	Proyek Pengembangan Strategi Skala Menengah-Besar yang diusulkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Prioritasnya	5-27
Tabel 6.1.1	Indikasi Program/Proyek untuk Pembangunan Kawasan GKS Tahun 2010-2030	6-2
Tabel 6.2.1	Perangkat Administratif untuk Pengembangan Lahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	6-6
Tabel 6.3.1	Jadwal Serangkaian Loka Karya	6-8
Tabel 6.3.2	Matrix Kemungkinan Dampak Lingkungan yang disebabkan oleh Pembangunan Spasial.....	6-14
Tabel 7.3.1	Modul Pelatihan Profesional untuk Administrasi Perencanaan Tata Ruang	7-8
Tabel 7.3.2	Program Penyegaran untuk Tingkat Manajerial.....	7-8

Gambar	Halaman
Gambar 1.2.1	Struktur Keseluruhan Sistem Perencanaan Tata Ruang 1-2
Gambar 1.5.1	Visi dan Kunci Strategi untuk Pengembangan Perspektif GKS Jangka Panjang 1-4
Gambar 2.5.1	Posisi Fungsional Kawasan di Propinsi Jawa Timur..... 2-8
Gambar 3.1.1	Proyeksi Penduduk menurut Skenario 3-1
Gambar 3.2.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan GKS berdasarkan Skenario 3-3
Gambar 4.1.1	Komposisi Kawasan GKS dan GKS Plus di RTRW Jawa Timur..... 4-2
Gambar 4.1.2	Koridor dan Kawasan Strategis di Kawasan GKS 4-2
Gambar 4.1.3	Konsep Struktur Sistem Pusat Permukiman dan Perkotaan di GKS 4-8
Gambar 4.1.4	Struktur Ruang Pusat Perkotaan Strategis dan Jaringan Jalan di GKS 4-8
Gambar 4.1.5	Konsep Struktur Ruang Perdesaan di Jawa Timur 4-11
Gambar 4.1.6	Kebijakan Urbanisasi dan Strategi Pembangunan Perkotaan Kawasan GKS..... 4-11
Gambar 4.2.1	Perkiraan Kepemilikan Kendaraan di Masa Depan 4-12
Gambar 4.2.2	Jaringan pada Tahun Dasar untuk Pemodelan Permintaan (Kota Surabaya) 4-14
Gambar 4.2.3	Estimasi Kemacetan Lalu Lintas di SMA 4-14
Gambar 4.2.4	Koridor Pengembangan Jalan di Kawasan GKS 4-16
Gambar 4.2.5	Koridor Pengembangan Jalan di Surabaya (Kasus Moderat)..... 4-17
Gambar 4.2.6	Koridor Pengembangan Jalan di Surabaya (<i>Expressway-Intensive Case</i>) 4-17
Gambar 4.2.7	Rencana Alternatif Jalan Tol di Surabaya 4-18
Gambar 4.2.8	Proyek Pengembangan Jalan Zona GKS dan Surabaya..... 4-22
Gambar 4.2.9	Tahapan Komponen Proyek Jalan (2015: Jangka Pendek)..... 4-23
Gambar 4.2.10	Proyek Flyover/Underpass di Surabaya 4-27
Gambar 4.2.11	Populasi yang di layani oleh Stasiun KA di Kawasan GKS (Eksisting: 2008) 4-28
Gambar 4.2.12	Populasi yang di layani oleh Stasiun KA di Kawasan GKS (Masa Depan: 2030) 4-29
Gambar 4.2.13	Konsep Pengembangan Kembali Stasiun Kota Lama 4-31
Gambar 4.2.14	Pengembangan Angkutan Umum di Surabaya Metropolitan Area..... 4-32
Gambar 4.2.15	Jaringan Angkutan Bus yang Diusulkan 4-34
Gambar 4.2.16	Pengembangan Pintu Intermode sekitar Stasiun Waru 4-35
Gambar 4.2.17	Lokasi Teluk Lamong 4-36
Gambar 4.2.18	Pengembangan Pelabuhan Eksisting dan yang direncanakan di GKS 4-36
Gambar 4.2.19	<i>Demand</i> Lalu Lintas Kontainer di Tg. Perak 4-37
Gambar 4.2.20	Enam Lokasi Kandidat untuk Pelabuhan Pintu Gerbang Daerah yang Baru..... 4-38
Gambar 4.2.21	Trend Penumpang Udara Tahunan di Bandara Juanda..... 4-39
Gambar 4.2.22	Rencana Induk Bandara Juanda 4-40
Gambar 4.2.23	Tampilan Sederhana dan Lahan untuk Runway Paralel Kedua..... 4-42
Gambar 4.2.24	Lokasi Alternatif Bandara Kedua dan Pengembangan Jalan Terkait 4-43
Gambar 4.2.25	Terminal Barang dan Kawasan Industri di GKS..... 4-44
Gambar 4.2.26	Rute Truk Utama di GKS 4-45
Gambar 4.2.27	Rute Truk Masa Depan di GKS 4-46
Gambar 4.2.28	Stasiun Kargo di Kalimas untuk Integrasi Terminal Kargo 4-47
Gambar 4.2.29	Terminal Barang/Pergudangan di Surabaya..... 4-48
Gambar 4.3.1	Perkiraan Kebutuhan Air Non-irigasi di Kawasan GKS..... 4-50
Gambar 4.3.2	Kebutuhan Air Irigasi menurut Perubahan Musim, 2003 4-50

Gambar 4.3.3	Ketersediaan Air Permukaan di Kawasan GKS.....	4-51
Gambar 4.3.4	Proyeksi Neraca Air di GKS Tahun 2030	4-52
Gambar 4.3.5	Sistem Suplai Air Saat Ini	4-54
Gambar 4.3.6	Proyek Pengalihan Air dari Sungai Bengawan Solo dan Umbulan.....	4-55
Gambar 4.4.1	Sistem Pengolahan Limbah Cair saat ini di GKS	4-57
Gambar 4.5.1	Jaringan Transmisi di Kota Surabaya	4-63
Gambar 4.5.2	Neraca Suplai-Permintaan Energi Listrik di Provinsi Jawa Timur.....	4-63
Gambar 4.6.1	Jumlah Pelanggan Jasa Telepon.....	4-66
Gambar 4.7.1	Perkiraan Masa Depan Timbulan Sampah di Kawasan GKS.....	4-69
Gambar 4.7.2	Lokasi Rencana Lahan TPA	4-71
Gambar 5.1.1	Teknik GIS untuk Keseluruhan Analisa Penggunaan Lahan.....	5-3
Gambar 5.1.2	Pola Distribusi Lahan dengan Kendala Pengembangan	5-5
Gambar 5.1.3	Pola Distribusi Lahan dengan Potensial Pengembangan Lahan (2009 dan 2030).....	5-6
Gambar 5.1.4	Evaluasi Keseluruhan dari Potensial Pengembangan Lahan (2009 dan 2030).....	5-7
Gambar 5.2.1	Faktor Lingkungan yang harus Dipertimbangkan untuk Konservasi dan Preservasi.....	5-10
Gambar 5.2.2	Struktur Permasalahan Lingkungan di Kawasan GKS	5-11
Gambar 5.2.3	Peta Wilayah Lingkungan Sensitif di Kawasan GKS	5-13
Gambar 5.3.1	Perkiraan Penggunaan Lahan untuk Perumahan dan Pelayanan Perkotaan di GKS Tahun 2030.....	5-15
Gambar 5.3.2	Demand Penggunaan Lahan Tambahan untuk Lokasi Industri Baru antara 2009 dan 2030 di Kawasan GKS.....	5-18
Gambar 5.4.1	Rencana Penggunaan Lahan Tambahan untuk Lokasi Industri Baru antara 2009 dan 2030 di Kawasan GKS.....	5-23
Gambar 5.5.1	Proyek Pengembangan Strategis Skala Menengah-Besar yang Diusulkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Prioritasnya	5-27
Gambar 5.5.2	Proyek Skala Menengah dan Besar Usulan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	5-28
Gambar 5.5.3	Usulan Zona Pengembangan Strategis di GKS untuk Tahun 2030	5-29
Gambar 5.6.1	Proses Logika untuk Memformulasikan Rencana Tata Ruang Wilayah GKS.....	5-30
Gambar 5.6.2	Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah GKS 2030.....	5-31
Gambar 6.3.1	Proses KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan GKS	6-9
Gambar 7.1.1	Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan GKS untuk Kerjasama antar Pemerintah	7-2
Gambar 7.1.2	Struktur Organisasi Badan Kerjasama Pembangunan GKS (Usulan).....	7-5

- SINGKATAN DAN AKRONIM -

3Rs	Reduce, Reuse, and Recycle atau Mengurangi, Menggunakan kembali dan Mendaur ulang
AGT	Automated Guideway Transit atau Kereta Transit Terpandu secara Otomatis
AKDP	Antar Kota Dalam Provinsi
AM	Automated Mapping atau Pemetaan secara Otomatis
APBD I	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
APBD II	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ARSDS-GKS	Study for Arterial Road System Development in Surabaya Metropolitan Area
ATCS	Area Traffic Control System atau Sistem Pengendalian Lalu Lintas Wilayah
BAKOSURTANAL	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEKO	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
BAPPEPROV	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi
BAT	Best Available Technology = Teknologi Terbaik yang Tersedia
BII	Bank Internasional Indonesia
BKPRD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BKTRN	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
BNI	Bank Nasional Indonesia
BPLS	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BRT	Bus Rapid Transit atau Bus Cepat Transit
BTN	Bank Tabungan Negara
BWK	Bagian Wilayah Kota
Bank JATIM	Bank Jawa Timur
C-KIP	Comprehensive Kampong Improvement Program atau Program Perbaikan Kampung Komprehensif
CBD	Central Business District atau Pusat Bisnis skala Kecamatan
CCTV	Closed Circuit Television
CDM	Clean Development Mechanism atau Mekanisme Pembangunan yang Bersih
CHP	Combined Heat and Power Production atau Kombinasi Produksi Listrik dan Panas
CIS	Customer Information System atau Sistem Informasi Pelanggan

CPR	Medium Term Development Program and Policies (Five years) atau Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM)
DAOP	Daerah Operasi
DAS	Automatic Distribution System atau Sistem Distribusi Otomatis
DAS	Daerah Aliran Sungai
DCC	Distribution Control Center atau Pusat Pengendalian Distribusi
DD	Detail Design
DKL program	Energy Demand and Load Forecast Program
DLLAJ	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSM	Demand Side Management atau Manajemen Sisi Permintaan
EIA	Environmental Impact Assessment atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
EJIIZ	East Java Integrated Industrial Zone atau Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur
EMS	Energy Management System atau Sistem Manajemen Energi
EMU	Electric Multiple Unit
EPR	Extended Producer Responsibility
ERR	East Ring Road atau Jalan Lingkar Timur
FM	Facility Management atau Manajemen Fasilitas
FS	Feasibility Study atau Studi Kelayakan
GDP	Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB)
GERBANGKERTOSUSILA	Gresik-Bangkalan–Mojokerto(Kota/Kabupaten)–Surabaya–Sidoarjo-Lamongan
GIS	Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis
GKS	GERBANGKERTOSUSILA-Gresik-Bangkalan-Mojokerto (Kota/Kabupaten)-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan
GKS Plus	GKS + Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, Jombang, Tuban, dan Kota Pasuruan
GOI	Government of Indonesia atau Pemerintah Indonesia
GOJ	Government of Japan atau Pemerintah Jepang
GPRS	General Packet Radio Service
GPS	Global Positioning System atau Sistem Posisi Global
GRDP	Gross Regional Domestic Product atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
GWh	Gigawatt-hour atau Gigawatt per jam
HIPPAM	Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development

IE	Industrial Estate
IFC	International Finance Corporation
IGES	Institute for Global Environment Startegies
IKK	Ibu Kota Kecamatan
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
IPP	Independent Power Producer
ISLF	Integrated Solid Waste Landfill atau TPA Terpadu
ISWM	Integrated Solid Waste Management atau Pengelolaan Sampah Terpadu
ITS	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
ITS	Intelligent Transport System atau Sistem Transportasi Pintar
ITU	International Telecommunication Union
JABODETABEK	Jakarta Metropolitan Area : Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi
Jamali	Jawa-Madura Bali
JBIC	Japan Bank for International Cooperation
JICA	Japan International Cooperation Agency
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KIP	Kampung Improvement Program
KKJS	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
kms	kilo meter span
KP Ruko	Kredit Pemilikan Rumah Toko
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KPR BCA Xtra	Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Central Asia Ekstra
KPR Multiguna	Kredit Pemilikan Rumah Multi Guna
KPR Syariah	Kredit Pemilikan Rumah Syariah
kWh	Kilowatt-hour atau Kilowatt jam
L/sec	Liter per second atau Liter per detik
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau Penguasaan Lahan dan Rencana Aksi Merumahkan Kembali
LDF	Load Density Factor
LF	Load Factor
LIS / LISB	Lamongan Integrated Shorebase
LLF	Loss Load Factor
LRT	Light Rail Transit
LV	Low Voltage

Lcpd	Liter per capita day atau Liter per Kapita per Hari
MENDAGRI	Menteri Dalam Negeri
MERR	Middle East Ring Road atau Jalan Lingkar Tengah Timur
MV	Medium Voltage
MVA	Mega-volt-ampere
MW	Megawatt
MWRR	Middle West Ring Road atau Jalan Lingkar Tengah Barat
NIP	Ngoro Industrial Persada, Mojokerto
NRW	Non-Revenue Water
NUSSP	Neighborhood Upgrading Shelter Sector Program
OD	Origin and Destination
OPLT	Time at Peak Load
P2KP	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
P2MPD	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBB	Pajak Bumi Bangunan
PCU	Passenger Car Unit
PDAB	Perusahaan Daerah Air Bersih (Provinsi)
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDM-DKE	Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
PERDA	Peraturan Daerah
PJT1	Perum Jasa Tirta 1
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKL	Pusat Kegiatan Lokal
PKN	Pusat Kegiatan Nasional
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTGU	Perusahaan Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTU	Perusahaan Listrik Tenaga Uap
PNPM Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PPP	Public-Private Partnership atau Kerja Sama Pemerintah-Swasta
PTKA	PT Kereta Api
PU	Pekerjaan Umum
PUCKTR	Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
RAPERDA	Rancangan Peraturan Daerah
ROW	Right-Of-Way

RP4D	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RT	Rukun Tetangga
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RW	Rukun Warga
Rusunami	Rumah Susun Sederhana Milik
Rusunawa	Rumah Susun Sederhana Sewa
SAIDI	System Average Interruption Duration Index
SAIFI	System Average Interruption Frequency Index
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SD	Sekolah Dasar
SDA2006	SInisiatif Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Mengatasi Banjir Dan Kekeringan di Pulau Jawa yang diterbitkan oleh Direktorat Sungai & Irigasi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Desember 2006
SIER	Surabaya Industrial Estate Rungkut, Surabaya
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMA	Surabaya Metropolitan Area
SME	Small and Medium Sized Enterprise atau Usaha Kecil dan Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNCF	Société Nationale des Chemins de fer Français
SRRTS	Surabaya Regional Rail Transport System
SSO	Automatic Vacuum Gas Pole Switch Sectionalizer
SSWP	Sub Satuan Wilayah Pembangunan
SUDP	Surabaya Urban Development Project
SULAM	Komuter Surabaya – Lamongan
SUMO	Komuter Surabaya – Mojokerto
SUPAS	Survei Penduduk Atar Sensus
SUSI	Komuter Surabaya – Sidoarjo
SUTT network	70-150 KV network
SWM	Solid Waste Management atau Pengelolaan Sampah
SWP	Satuan Wilayah Pembangunan
TAZ	Traffic Analysis Zone

TID	Telemetering
TK	Taman Kanak-kanak
TOD	Transit Oriented Development atau Pembangunan Berorientasi Transit
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TRAFO	Transformer
TS	Transfer Station
UGR	Unit Waste Generation
UNEP	United Nations Environment Programme
UP	Unit Pengembangan
USO	Universal Service Obligation
V/C	Volume-Capacity
VMS	Variable Message Signboard
WPUT	Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
WRR	West Ring Road atau Jalan Lingkar Barat
WTE	Waste to Energy atau Konversi Sampah menjadi Energi

1. PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

GERBANGKERTOSUSILA (yang selanjutnya disebut dengan "GKS") di Propinsi Jawa Timur adalah kawasan ekonomi terbesar kedua di Indonesia. GKS terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, and Kota Surabaya. Master Plan pengembangan Kawasan GKS sebelum ini pada Tahun 1983 dirumuskan dengan bantuan pendampingan dari JICA.

Di Indonesia, Undang-undang Penataan Ruang yang diperbarui/dirubah pada Bulan April 2007 menetapkan bahwa pada tingkatan pemerintahan Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota harus menyiapkan Rencana Penataan Ruang. Rencana Penataan Ruang Nasional dirumuskan pada bulan Maret 2008, yang selanjutnya pedoman ini diacu oleh pemerintah Propinsi untuk menyusun Rencana Penataan Ruang mereka. Selanjutnya masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menyelesaikan penyiapan Rencana Penataan Ruangnya pada Bulan April 2010 berdasarkan pada Rencana Penataan Ruang Propinsi. Sebuah Rencana Penataan Ruang untuk suatu kawasan metropolitan seperti halnya GKS, bila diperlukan, dapat dirumuskan sebab Kawasan GKS adalah satu dari kawasan-kawasan strategis nasional, dan rencana kerjanya seharusnya dilanjutkan melalui inisiatif daripada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.

1.2 Tujuan Studi

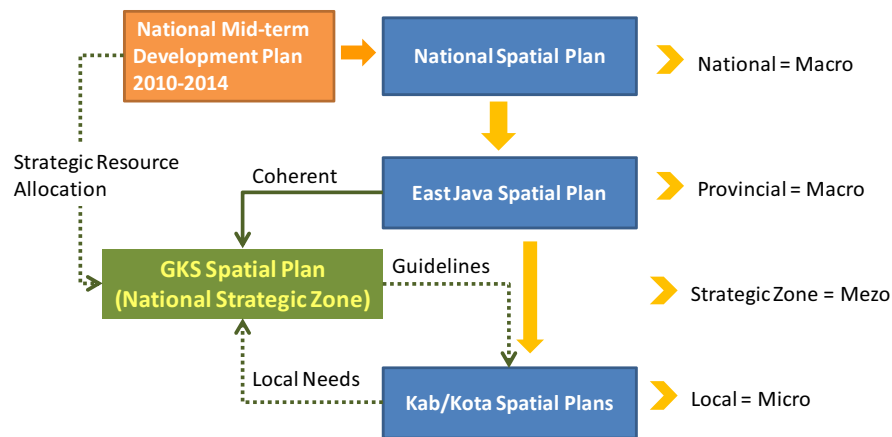
Tujuan daripada Studi, sebagaimana telah disebutkan dalam Lingkup Kerja yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, adalah sebagai berikut:

- Untuk merumuskan Rencana Penataan Ruang Kawasan GKS dengan target sampai dengan Tahun 2030;
- Untuk menyiapkan rencana implementasi transportasi perkotaan dalam wilayah studi; dan
- Untuk menguatkan kapasitas personel dan institusi mitra kerja dalam pelaksanaan Studi.

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk merumuskan visi jangka panjang (di 2 dekade mendatang) agar GKS sebagai kawasan strategis nasional harus mengejar perkembangan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, dan melakukan identifikasi proyek-proyek jangka pendek dan program yang akan diprioritaskan dalam kurun waktu lima tahun yang sejalan dengan strategi untuk mencapai visi.

Rencana tata ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, harus membahas penggunaan lahan yang seimbang, atau pola spasial, dengan pertimbangan yang memadai untuk pelestarian lingkungan dan konservasi. Rencana tata ruang juga harus menggambarkan sistem infrastruktur jaringan yang paling ekonomis efisien dan rasional secara fungsional untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk sistem transportasi, sistem air bersih, sistem drainase dan saluran air, listrik dan jaringan telekomunikasi, pengelolaan limbah padat, dan sebagainya yang kesemuanya terpadu.

Pedoman tentang bagaimana menerapkan rencana tata ruang dan bagaimana untuk mengelola pertumbuhan yang direncanakan adalah fokus isu lain yang harus ditangani secara hati-hati. Untuk tujuan ini, pemerintah Propinsi harus diberdayakan dalam hal kapasitas anggaran dan yang dapat dilaksanakan, dan praktek yang baik sangat diperlukan untuk membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.



Sumber: Tim Studi JICA

Gambar 1.1.1 Struktur Keseluruhan of Sistem Perencanaan Spasial

Hasil dari Studi di susun dengan set volume laporan terpisah sebagai berikut:

- Volume 1: Ringkasan (Bahasa Inggris, Indonesia dan Jepang)
- Volume 2: Teks Utama (*Main Text*) (Bahasa Inggris dan Indonesia)
- Volume 3: Atlas GIS: Peta Kunci dan Gambar untuk Rencana Tata Ruang GKS (Bahasa Inggris)
- Volume 4: Rencana Aksi Pengembangan untuk Sektor Transportasi (Bahasa Inggris)

Catatan: Laporan dalam Bahasa Inggris adalah resmi dan dapat dijadikan sebagai acuan, apabila ada kalimat atau ekspresi dalam Bahasa Indonesia yang tidak jelas atau tidak benar.

1.3 Visi dan Misi

1.3.1 Visi

Sebagai kawasan strategis nasional, visi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan GKS telah ditentukan sebagai berikut:

“Mewujudkan Kawasan GKS sebagai Pusat Pertumbuhan Global dan Berkelanjutan melalui penciptaan Logistik dan Jendela Ekonomi Dunia, serta Metropolitan yang Cerdas dan Hijau”

Visi tersebut diatas dapat diekspresikan melalui empat kata kunci yaitu: GKS, Global, Hijau, Tumbuh (**Global, Green, Growing GKS**) (4G)

1.3.2 Misi/Tujuan

Konsep-konsep kunci yang menggarisbawahi visi tersebut di atas diinterpretasikan ke dalam misi yang sesuai seperti di bawah ini.

Tabel 1.3.1 Misi/Tujuan Pembangunan Kawasan GKS pada Masa Depan

Konsep Kunci Visi	Misi/Tujuan
Global / Jendela Dunia	- Menciptakan GKS yang dikenali dunia untuk menarik perhatian dan investasi
Keberlanjutan	- Mempertahankan sumber daya berdasarkan daya dukung dan sumber daya terbarukan - Masyarakat yang berkelanjutan dengan melindungi mereka melalui tata kelola pemerintah dan warga negara yang baik dan manajemen bencana
Pusat Pertumbuhan	- Mengembangkan GKS sebagai pusat pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lingkungan binaan berstandar tinggi dengan menyediakan infrastruktur, perumahan dan pelayanan sosial yang tepat
Logistik	- Meningkatkan sistem jaringan transportasi yang efisien
Ekonomi	- Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan mementingkan kegiatan ekonomi lokal secara seimbang
Cerdas	- Menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan mengembangkan sumber daya manusia
Hijau	- Membangun dan memelihara basis pertanian berkelanjutan - Menciptakan kawasan yang hijau dan ramah lingkungan

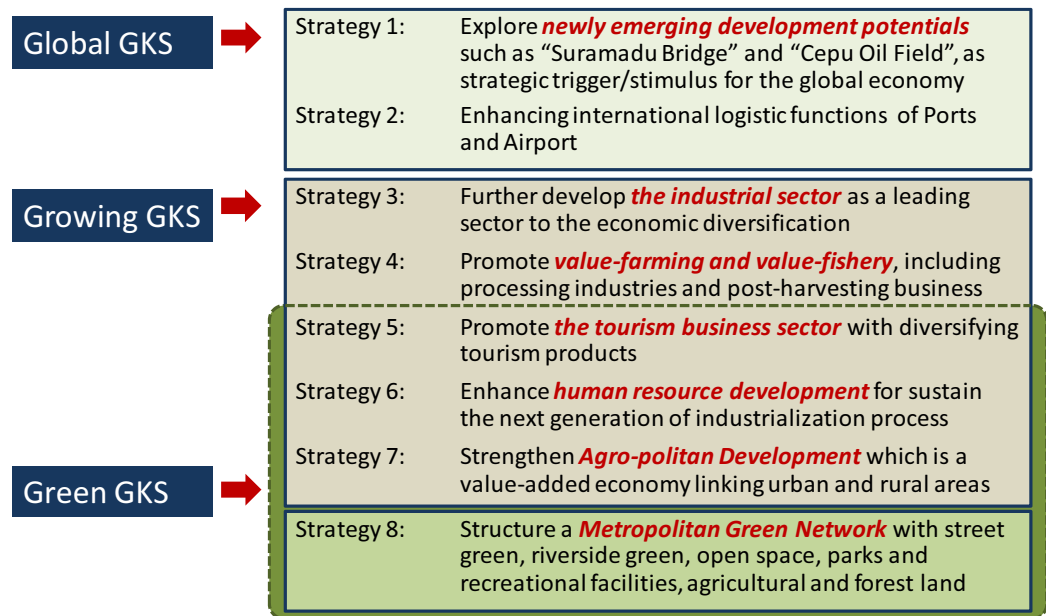
Sumber: Tim Studi JICA

1.4 Strategi Pembangunan Utama GKS

Dalam rangka mencapai visi yang dicanangkan, seperti 4G, untuk pengembangan GKS pada perspektif jangka panjang diidentifikasi 8 (delapan) strategi, yaitu:

- Strategi 1: Meneliti potensi pembangunan yang baru muncul seperti "Jembatan Suramadu" dan "Lapangan Minyak Cepu", sebagai pemicu strategis / stimulus bagi perekonomian global
- Strategi 2: Meningkatkan fungsi logistik internasional Pelabuhan dan Bandara
- Strategi 3: Mengembangkan lebih lanjut sektor industri sebagai sektor utama menuju penganekaragaman ekonomi
- Strategi 4: Mempromosikan pertanian dan perikanan yang bernilai, termasuk industri pengolahan dan bisnis pasca-panen
- Strategi 5: Mempromosikan usaha sektor pariwisata dengan penganekaragaman produk wisata
- Strategi 6: Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk mempertahankan proses industrialisasi generasi berikutnya
- Strategi 7: Memperkuat Pembangunan Agropolitan yang merupakan nilai tambah ekonomi yang menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan
- Strategi 8: Menstrukturkan Jaringan Metropolitan Hijau dengan jalan yang hijau, bantaran sungai hijau, ruang terbuka, taman dan fasilitas rekreasi, lahan pertanian dan hutan

Gambar 1.4.1 menunjukkan antar-hubungan antara masing-masing visi dan strategi untuk mencapai visi tersebut. Strategi 1 dan 2 adalah suatu keharusan untuk mencapai visi "Global GKS" dan Strategi 3 sampai 7 relevan untuk mencapai visi "Growing GKS". Dalam hal yang sama, visi dari "Green GKS" perlu menggali Strategi 5 sampai 8, termasuk pariwisata dan strategi yang berhubungan dengan pertanian..



Gambar 1.4.1 Visi dan Kunci Strategi untuk Pengembangan Perspektif GKS jangka panjang

1.5 Tujuan Perencanaan Tata Ruang Kawasan GKS

Tujuan dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS dengan target tahun 2030, sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional, adalah:

- Untuk menyediakan peta langkah untuk mencapai visi jangka panjang (di 2 dekade mendatang), yang diwakili oleh "Visi 4 G";
- Untuk memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi sebagai kawasan pertumbuhan utama;
- Untuk mewujudkan sistem tata guna lahan yang seimbang dalam pertimbangan konservasi lingkungan;
- Untuk merencanakan jaringan infrastruktur fungsional yang rasional, termasuk:1) sistem transportasi, 2) sistem penyediaan air, 3) sistem drainase dan pembuangan air kotor, 4) jaringan listrik dan telekomunikasi, 5) pengelolaan limbah padat; dan infrastruktur lainnya, dan
- Untuk mengidentifikasi proyek-proyek jangka pendek dan program dalam kerangka lima tahun (2015).

Perencanaan tata ruang harus didasarkan pada Undang-Undang yang ada, seperti Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang Tahun 2007, dan harus sesuai dengan sejumlah peraturan yang relevan dengan pengembangan prasarana, konservasi lahan pertanian, dan perlindungan sumber daya lingkungan, serta saling berkaitan dengan rencana tata ruang yang ada yang tingkatannya lebih tinggi atau lebih rendah, seperti berikut ini:

- Rencana Tata Ruang Nasional (2008-2028))
- Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Timur (2009-2029)
- Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (2009-2029)
- Rencana Tata Ruang Kota Mojokerto (2007-2027)
- Rencana Tata Ruang Kabupaten Gresik (2007-2027)
- Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangkalan (2008-2028)
- Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (2009-2029)

- Rencana Tata Ruang Kabupaten Mojokerto (2007-2027)
- Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan (2008-2028)

1.6 Peraturan dan Undang-Undang yang Relevan

Rencana tata ruang harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada yang relevan dengan perencanaan tata ruang dalam hal pengembangan prasarana, konservasi lahan pertanian, dan perlindungan sumber daya lingkungan (lihat lampiran dari volume ini). Rencana tata ruang tersebut juga harus mencakup dasar hukum untuk manajemen proyek dan pengaturan kelembagaan untuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah.

2. ISYU PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT

2.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Nasional

2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Perencanaan tata ruang Nasional yang diatur dalam arahan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyebutkan dalam sub bab IV.1.5 lampiran (10) bahwa "perencanaan spasial digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, dan daerah sehingga pemanfaatan ruang bisa sinergis, harmonis, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang disusun dalam sebuah hirarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan di bidang perencanaan tata ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. "

Menurut Peraturan Presiden Nomor 05 tahun 2010 dalam lampiran Bab 2.9, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)** untuk tahun 2010 hingga 2014, dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi utama, yaitu:

- 1) *Pengendalian dan pelaksanaan rencana tata ruang*: Hal ini biasanya dilakukan melalui:
 - Memperkuat basis data dan informasi tata ruang serta analisisnya, demikian juga dengan pemetaan seluruh wilayah teritorial nasional; dan
 - Pelaksanaan terhadap rencana tata ruang yang berkelanjutan.
- 2) *Koordinasi dan integrasi dari wilayah perkotaan dan pedesaan, demikian juga diantara kawasan prioritas (zona strategis, zona tertinggal, zona perbatasan, dan zona rawan bencana)*: Hal tersebut dilaksanakan melalui:
 - Promosi pusat pertumbuhan, meningkatkan daya tarik wilayah pedesaan, dan membentuk hubungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan;
 - Percepatan pengembangan kawasan prioritas, seperti, zona strategis yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, zona tertinggal, dan zona perbatasan; dan
 - Pengutamaan pengurangan resiko bencana dan manajemen bencana di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan.
- 3) *Desentralisasi dan manajemen pemerintahan daerah, yang akan dilaksanakan dalam 12 sektor prioritas*: Pelaksanaan keseluruhan dari pembangunan daerah harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Kebijakan reformasi agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan lahan;
 - Kebijakan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten / kota; dan
 - Meningkatkan kemampuan pembuatan kebijakan untuk para pejabat pemerintah daerah dan kapasitas keuangan untuk pemerintah daerah.

2.1.2 Implementasi Arah dan Strategi Perencanaan Tata Ruang

Arah kebijakan dalam pelaksanaan tata ruang adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tata ruang

yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, dan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, target numerik untuk rencana pembangunan nasional adalah sebagai ditunjukkan pada Tabel 2.1.1:

Tabel 2.1.1 Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014)

NO.	ASPEK PEMBANGUNAN	SASARAN (2010-2014)	
1.	Ekonomi		
a)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata 6.3 – 6.8% / tahun	
b)	Inflasi	Rata-rata 4 – 6% / tahun	
c)	Tingkat Pengangguran	5 – 6% pada akhir tahun 2014	
d)	Tingkat Kemiskinan	8 – 10% pada akhir tahun 2014	
2.	Education		
		Status Awal (2008)	Target Tahun 2014
a)	Meningkatnya waktu rata-rata penduduk usia sekolah 15 tahun dan lebih tua (tahun)	7.50	8.25
b)	Penurunan penduduk buta aksara usia 15 tahun dan lebih tua (%)	5.97	4.18
c)	Meningkatkan pendaftaran sekolah SD / SDLB / MI / Paket A (%)	95.14	96.00
d)	Peningkatan pendaftaran sekolah SMP / SMPLB / MTs / Paket B (%)	72.28	76.00
e)	Peningkatan pendaftaran Sekolah Lanjutan SMA / SMALB / MA / Paket C (%)	64.28	85.00
f)	Meningkatkan pendaftaran tingkat Perguruan Tinggi berusia 19-23 (tahun)	21.26	30.00
g)	Penurunan kesenjangan dan kualitas partisipasi layanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial-ekonomi, dan di antara penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
3.	Kesehatan		
a)	Meningkatnya harapan hidup (tahun)	70.70	72.00
b)	Penurunan angka kematian ibu / 100.000 kelahiran hidup	228.00	118.00
c)	Penurunan kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup	34.00	24.00
d)	Penurunan prevalensi anak-anak kekurangan gizi di bawah 5 tahun (%)	18.40	< 15.00
4.	Cadangan Kebutuhan Pokok		
a)	Produksi Padi	Pertumbuhan tahunan: 3.22 %	
b)	Produksi Jagung	Pertumbuhan tahunan: 10.02 %	
c)	Produksi Kedelai	Pertumbuhan tahunan: 20.05 %	
d)	Produksi Gula	Pertumbuhan tahunan: 12.55 %	
e)	Produksi Daging	Pertumbuhan tahunan: 7.30 %	
5.	Energi		
a)	Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik	3,000 MW/tahun	
b)	Meningkatkan rasio elektrifikasi	80 %	
c)	Meningkatkan produksi minyak bumi	1.01 juta barel/hari	
d)	Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi	5,000 MW	
6.	Prasarana		
a)	Pembangunan Bendungan di Sumatera, DKI, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua	hingga 19,370 km sampai 2014	
b)	Pengembangan jaringan prasarana dan penyediaan jasa transportasi terintegrasi antar-moda dan antar-pulau sesuai dengan Blue Print Sistem Transportasi Nasional	Akan diselesaikan	

NO.	ASPEK PEMBANGUNAN	SASARAN (2010-2014)
	dan Multi-moda Transportasi	
c)	Penyelesaian pengembangan jaringan Fiber Optic di Indonesia Timur	Akan selesai tahun 2013
d)	Peningkatan jaringan dan sistem transportasi di empat kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan)	Akan diselesaikan

Sumber: Dokumen RPJMN 2010-2014, Peraturan Presiden No.05/2010-Lampiran-1.

2.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang Jawa-Bali

Tujuan Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali adalah untuk mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk mewujudkan kesatuan dan keseimbangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur pembangunan di kawasan terpadu ekosistem pulau Jawa-Bali yang mencakup:

- 4) Mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung utama nasional;
- 5) Pengendalian pembangunan fisik kawasan perkotaan dan perluasan perkotaan tak terarah;
- 6) Mengembangkan Jawa-Bali sebagai pusat industri pengolahan;
- 7) Memanfaatkan sumber daya mineral dan minyak dan gas yang tersedia di Jawa-Bali secara berkelanjutan dan layak;
- 8) Mewujudkan Jawa-Bali sebagai pusat pariwisata dan jasa;
- 9) Mempertahankan kawasan lindung sekurangnya 30% dari Jawa-Bali untuk wilayah ekosistem berbasis air;
- 10) Mempercepat pembangunan wilayah pantai selatan Pulau Jawa, dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung dan rawan bencana;
- 11) Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi antar-modal untuk memperkuat daya saing Jawa-Bali, dan
- 12) Meningkatkan hubungan sinergis antara Jawa-Bali dan pulau-pulau lainnya.

Selain itu, kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang nasional dan pola tata ruang di Pulau Jawa-Bali dilakukan melalui:

- 1) Mempertahankan lahan pertanian;
- 2) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- 3) Mengembangkan dan mengendalikan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luas lahan pertanian;
- 4) Mendorong kegiatan pemanfaatan ruang di daerah perkotaan metropolitan dan besar secara vertikal dan kompak;
- 5) Pengendalian urban sprawl dan keterkaitan antara daerah perkotaan dan pedesaan;
- 6) Mengembangkan industri ramah lingkungan dan jasa, menghemat ruang, dan padat karya, mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam pengembangan kawasan industri dan industri estat;
- 7) Pengendalian pemanfaatan kawasan sumber daya alam mineral dan minyak dan gas;
- 8) Mendorong pengembangan pusat pelayanan;

- 9) Mengembangkan kawasan wisata terpadu berbasis pada keunikan alam, satwa liar, sosial, budaya, dan ekonomi;
- 10) Menstabilkan fungsi kawasan lindung dan merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang terdegradasi;
- 11) Pengendalian aktivitas pemanfaatan ruang di daerah hulu sungai dan merehabilitasi daerah hulu yang terdegradasi dan daerah infiltrasi untuk mempertahankan sumber daya air untuk ketersediaan air dalam jangka panjang;
- 12) Mempercepat pengembangan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Jawa dan interkoneksi antara wilayah pantai selatan dengan pantai utara dan pusat Pulau Jawa;
- 13) Mendorong pengembangan di Jaringan Jalan Lintas Selatan dan Jaringan Lalu Lintas Jalan Pantai Selatan Pulau Jawa, dan Lintas Utara Bali untuk meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dan terisolasi dalam batasan daya dukung lingkungan;
- 14) Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru / daerah perkotaan Pantai Selatan Jawa berdasarkan mitigasi bencana;
- 15) Mendorong pengembangan infrastruktur antar-modal untuk daya saing ekonomi dan untuk membuka akses antar-pulau (termasuk pulau-pulau kecil);
- 16) Mendorong koneksi nasional antar-pulau didasarkan pada pembangunan daerah khusus; dan
- 17) Menjaga pulau-pulau kecil batas wilayah sebagai titik dasar wilayah ke dasar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara, strategi operasional untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Jawa-Bali dilakukan melalui:

- 1) Mengelola pengembangan perumahan, usaha / komersial, fasilitas industri yang berlebihan di daerah penyangga pinggiran dan / atau sepanjang arteri primer dan jalan kolektor primer;
- 2) Mengintegrasikan dan mendorong relokasi kegiatan industri di daerah perkotaan menjadi peruntukan untuk kawasan industri;
- 3) Mendorong pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 4) Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Raya Jabodetabek dan **Gerbangkertosusila (GKS)** sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi skala internasional, keuangan dan kesehatan;
- 5) Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- 6) Mendorong pembangunan perkotaan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Denpasar sebagai pusat pariwisata;
- 7) Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dan sinergi antara daerah perkotaan dan pedesaan; dan
- 8) Mengurangi bencana perkotaan dan dampak negatif akibat pemanasan global.

2.3 Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Jawa Timur

Tujuan utama dari Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur ditentukan berdasarkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur 2005 - 2025.

Visi dan misi yang digambarkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan masing-masing Kota / Kabupaten serta Provinsi Jawa Timur sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.31 dan 2.3.2.

Rencana Tata Ruang Jawa Timur memberi arahan sejumlah isu strategis, dengan fokus pada:

- 1) Isu kemampuan lahan / daya dukung dan konversi lahan;
- 2) Masalah kesenjangan ekonomi, prasarana dan sarana, dan sumber daya manusia;
- 3) Masalah bencana alam dan kerentanan;
- 4) Masalah bencana lumpur Lapindo dan implikasi sosial-ekonomi;
- 5) Isu konversi hutan dan lahan pertanian, terutama untuk lahan beririgasi;
- 6) Isu kurangnya integrasi sektor pertanian, dan di antara sistem produksi dan distribusi, dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah produksi pertanian;
- 7) Masalah globalisasi, urbanisasi dan pertumbuhan kota mengarah ke urban sprawl dan kota-kota mega, terutama di kota-kota besar di Jawa Timur;
- 8) Isu ketahanan pangan;
- 9) Isu pengembangan potensi prasarana yang strategis bagi transportasi, energi dan telekomunikasi, termasuk Jembatan Suramadu, pembangunan pelabuhan di Tuban, Lamongan, Gresik, hingga Situbondo, pengembangan sumber energi alternatif dan pengolahannya.

Dalam rangka memecahkan masalah-masalah pembangunan seperti yang diidentifikasi di atas, sasaran pembangunan ditunjukkan sebagai berikut::

- 1) Wilayah Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis, terkemuka, kompetitif secara global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur yang makmur;
- 2) Mempunyai struktur ruang dan kondisi fisik yang baik terutama dengan keseimbangan optimal pemanfaatan ruang antara ruang hijau / terbuka dan area terbangun; dan keseimbangan spasial penggunaan lahan dan transportasi;
- 3) Pusat-pusat pertumbuhan utama yang dapat berfungsi secara regional-nasional.
- 4) Perlindungan lingkungan untuk pengelolaan air, udara, tanah, karena dampak negatif dari pengembangan dan perlindungan hutan dan pengurangan irigasi teknis;
- 5) Sumber daya manusia yang kompetitif secara global khususnya dalam rangka menanggapi persyaratan untuk globalisasi sehingga Jawa Timur harus siap untuk menjadi bagian dari sistem global;
- 6) Ketersediaan pangan daerah yang stabil, mewujudkan potensi besar pangan di Jawa Timur untuk mendukung tujuan nasional dalam ketahanan pangan; dan
- 7) Keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur.

Tabel 2.3.1 Visi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di GKS

EAST JAVA	Kota Surabaya	Kota Mojokerto	Kabupaten Gresik	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Lamongan
2009 - 2029	2009 - 2029	2007 - 2027	2007 - 2027	2008 - 2028	2009 - 2029	2007 - 2027	2008 - 2028
Perda /2009				Perda No.10/2009	Perda No.06/2009		
Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global	Surabaya sebagai Kota Jasa yang Nyaman, Berdaya, Berbudaya dan Berkeadilan	Mewujudkan Masyarakat Kota Mojokerto yang berkarakter makmur, damai, tenteram, dan berdaya saing di	Mewujudkan Penataan Ruang yang Mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi dan Berwawasan	Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan sebagai Pintu Gerbang Madura	Sidoarjo Berkembang menjadi Wilayah Pertanian, Perikanan, dan Industri yang berbasis pada Agro pertanian, Agro perikanan serta Perdagangan Jasa dan	Terwujudnya penataan ruang Kabupaten Mojokerto yang produktif, responsif, integratif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan sebagai Kawasan

dalam Pembangunan Berkelanjutan		dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Lingkungan	menuju Kota Industri, Pariwisata dan Jasa	Permukiman yang Layak/Harmoni dengan lingkungan yang Berkelanjutan	kesejahteraan masyarakat, dengan bertumpu pada partisipasi dan kemitraan	Pengembangan Industri, Pertanian dan Pariwisata
---------------------------------	--	--	------------	---	--	--	---

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Kawasan GKS

Tabel 2.3.2 Misi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di GKS

Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Mojokerto	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	Kab. Mojokerto	Kab. Lamongan
Year 2009 - 2029	Year 2006 - 2010	Year 2007 - 2027	Year 2007 - 2027	Year 2008 - 2028	Year 2009 - 2029	Year 2007 - 2027	Year 2008 - 2028
Perda ... /2009				Perda No.10/2009	Perda No.06/2009		
Mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;	Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, berkompeten, efisien dan profesional	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera	Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata	Keseimbangan pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan	Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global	Mewujudkan sistem penataan ruang yang produktif, dengan mengembangkan sistem kegiatan ekonomi dan investasi yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah
Mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus Perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah Greater Surabaya dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem Teknologi Informasi yang memadai	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi	Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi	Penataan kembali kawasan lindung dan budidaya di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan	Mengembangkan perekonomian wilayah yang tangguh dan berkeadilan sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Menciptakan kesiapan dalam penyediaan ruang untuk menjamin keberlangsungan dinamika wilayah	Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan
Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan;	Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang di dukung oleh iklim usaha	Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional	Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan	Mewujudkan pola ruang yang selaras dengan kebudayaan masyarakat Bangkalan yang religius patemalistik (islami) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan pola ruang yang berkelanjutan pada lingkungan sekitarnya	Meningkatkan penataan ruang wilayah melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian dan dinamikan perkembangan wilayah	Meningkatkan program-program dan kaji tindak pembangunan yang mampu menjamin eksistensi dan keberlanjutan fungsi lingkungan (berwawasan lingkungan), kelestarian sumberdaya dan mengurangi kerusakan lingkungan	Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif
Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi;	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui fasilitasi kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha Informal lainnya	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)	Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi dengan menyertakan peran masyarakat didalamnya.	Mengembangkan tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan penataan ruang wilayah	Mewujudkan upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mendayagunakan kemampuan sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan, diantaranya dengan menciptakan peluang usaha-usaha ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan	Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi
Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional	Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman	Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari		Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif		Membangun dan memberikan ruang partisipasi dan kemitraan seluas-luasnya kepada semua stakeholder, yaitu masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga lain dalam penataan	

Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Mojokerto	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	Kab. Mojokerto	Kab. Lamongan
Mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan	Meningkatkan kualitas pendidikan berwawasan kebangsaan dan berkualitas global yang terjangkau bagi warga kota serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		Merumuskan ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disentif serta arahan sanksi		ruang	
Mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat						
	Menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal, kegiatan keagamaan, mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berakhlakul karimah						

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Kawasan GKS

2.4 Analysis SWOT GKS

Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) dilakukan untuk melihat keseluruhan rona kegiatan sosial dan ekonomi di GKS, dengan ringkasan yang dijelaskan pada Tabel 2.4.1. Sedikit untuk disampaikan, faktor-faktor kelemahan yang dimiliki oleh GKS harus dikurangi, dan yang kuat harus lebih difasilitasi. Berdasarkan kedua sisi tersebut GKS harus memanfaatkan semua peluang yang diidentifikasi, sehingga meminimalkan ancaman di masa depan. Semua pertimbangan diatas terintegrasi dalam visi pembangunan sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya.

Strength	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> • Second largest economic agglomeration in Indonesia as another potential growth center • Rich agricultural and fishery potentials with vast irrigated agricultural land • Functional port and airport linked with the world market • Strengthened gateway function to Madura Island with the Suramadu Bridge • Availability of well-educated persons and skilled labor force in a variety of cottage industries • Expectation of national government's special policies for infrastructure provisions 	<ul style="list-style-type: none"> • Susceptible water resource • Chronic water shortage problems in dry season • Heavy traffic congestions in Surabaya and its vicinities, thereby leading to a massive daily economic loss • Overall water-related environment being degraded due to lack of sewerage systems • Many areas suffering from disasters such as floods and land sliding • Port logistic function, which is the lifeline of Surabaya Economy, reaching to the max capacity level, and unstable supply of electric power • Weak governance for legal enforcement and investment administration
Opportunity	Treat
<ul style="list-style-type: none"> • Be a world-recognized commercial, industrial and logistic center where attracts both domestic and international investors • Be a leading area for advanced food supply activities, agribusiness, and agro-processing industries • Be a human resource center to support value-added types of economies through trading, financing and tourism services • Be one of the Asian port, given a well functioning deep-sea port for sufficient container terminals. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disorderly and/or illegally land conversion from forest and agricultural land to housing and urban land use • Critical damage on water resource capacity and water supply crisis on agricultural, industrial and urban activities • Rapid urbanization, resulting in uneven distribution of people, proliferation of slums, and shortage of public service facilities • Increasing diseconomies of "agglomeration", due to congestions and environmental degradation, thereby losing the growth opportunity

Tabel 2.4.1 Analisis SWOT Kawasan GKS berdasarkan Evaluasi Keseluruhan

2.5 Fungsi dan Peran GKS

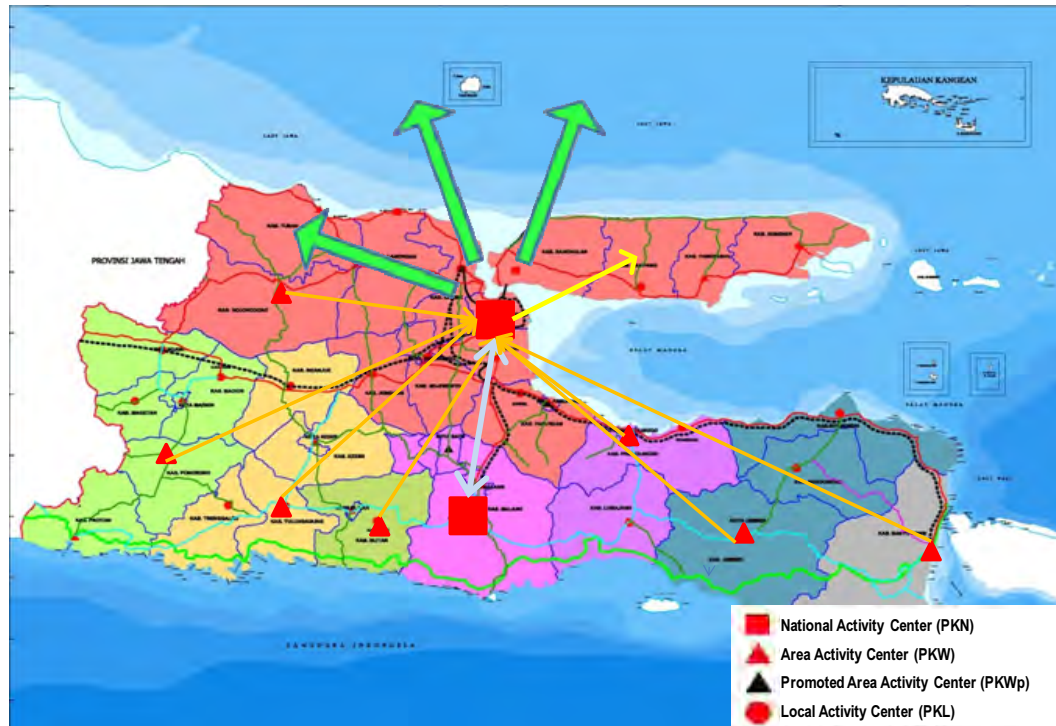
Berdasarkan analisis SWOT, fungsi dan peran yang diharapkan dari GKS adalah untuk menjadi Pusat Kegiatan Nasional¹ dengan kapasitas sebagai berikut:

- 1) Pusat unggulan pertumbuhan ekonomi terkemuka di Indonesia,
- 2) Sebagai pusat distribusi logistik regional barang dan pintu gerbang ekspor-impor, yang mewakili Provinsi Jawa Timur,
- 3) Pusat ekonomi pertanian, industri dan pariwisata ternama

Di tingkat Provinsi, GKS akan berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan Jawa Timur untuk mendorong daerah-daerah tetangga untuk mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi secara keseluruhan. Sementara di tingkat lokal, GKS harus membuat permintaan lokal baru untuk pertanian, industri, komersial, pariwisata dan kegiatan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. pariwisata dan kegiatan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

¹ Pusat Kegiatan Nasional (Peraturan Pemerintah No. 26/ 2008) didefinisikan sebagai fungsi penting dari:

- a) Zona fungsi untuk node kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang internasional;
- b) Potensi kegiatan industri skala nasional; dan
- c) Potensi untuk simpul transportasi utama skala nasional.



Gambar 2.5.1 Posisi Fungsional Kawasan GKS di Provinsi Jawa Timur

2.6 Isu-isu Pembangunan, Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Tata Ruang GKS

Melalui analisis SWOT serta serangkaian penelitian dasar diidentifikasi isu-isu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, prasarana dan utilitas sanitasi dan transportasi, yang harus ditangani. Berdasarkan pengenalan isu-isu ini, kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Kawasan GKS telah ditetapkan sebagai berikut.

2.6.1 Pembangunan Sosial dan Ekonomi Regional

(1) Isu-isu Pembangunan

- 1) Meningkatnya kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan;
- 2) Tingkat pengangguran tinggi, khususnya dalam kaitan dengan tingkat pendidikan;
- 3) Meningkatnya jumlah urbanisasi;
- 4) Kemiskinan di daerah pedesaan, dan keterbatasan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan untuk meningkatkan produk pertanian dan mendorong industri pengolahan; dan
- 5) Pembangunan industri di pusat perkotaan menjadi penyebab biaya ekonomi tinggi akibat kemacetan lalu lintas dan degradasi lingkungan.

(2) Kebijakan dan Strategi

GKS harus menciptakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sebagai pusat pertumbuhan nasional lainnya dengan kebijakan kunci sebagai berikut:

Kebijakan 1: Penguatan kegiatan ekonomi dan fungsi perkotaan yang berpusat pada Metropolitan Surabaya

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 1:

- 1) Peningkatan lingkungan bisnis yang baik untuk layanan dan perdagangan, industri, fungsi MICE, logistik dan kemudahan perkotaan lainnya;
- 2) Pengembangan ekonomi perkotaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang terbaik untuk menarik investasi dan peminat lainnya;
- 3) Pengembangan jaringan prasarana di tingkat internasional, nasional dan regional;
- 4) Promosi wilayah berorientasi ekologi dengan ruang hijau; dan
- 5) Mengenalkan industri teknologi tinggi dan sumber daya dan pembangunan terkait teknologi tinggi dan pengembangan sumber daya manusia.

Policy 2: Improvement of equitable development among GKS through development of agropolitan and agri-based rural economy

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 2:

- 1) Pengembangan pertanian, industri berbasis pertanian dan pusat-pusat aktivitas terkait;
- 2) Memperkuat keterkaitan ekonomi antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan melalui agropolitan;
- 3) Pengembangan prasarana fisik dan fasilitas untuk pertanian dan agribisnis dari produksi, pemasaran, pembiayaan, perdagangan, dan transportasi, dan lainnya yang diperlukan;
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran untuk membuka akses ke pasar ekspor;
- 5) Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan pertanian, termasuk, organisasi koperasi petani dan pendanaannya.

2.6.2 Pembangunan Struktur Ruang

(1) Isu-isu Pembangunan

Struktur spasial GKS perlu dibentuk cukup fungsional untuk menampung kegiatan ekonomi dan sosial sebagai antisipasi dalam jangka panjang. Untuk tujuan ini, berikut ini adalah masalah yang akan ditangani dalam perencanaan tata ruang:

- 1) Sumber daya ekonomi dan kegiatan lebih konsentrasi ke Kota Surabaya, sehingga membutuhkan sebuah sistem hirarki pusat pemukiman manusia untuk secara efisien mendistribusikan sumber daya ekonomi dan manfaat pembangunan ke masyarakat lokal di seluruh kawasan GKS;
- 2) Meningkatnya kesenjangan kondisi ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga terjadi meningkatnya kebutuhan untuk merumuskan mekanisme untuk menyetarakan "eksistensi dan kemakmuran" antara masyarakat perkotaan dan pedesaan;
- 3) Meluasnya urbanisasi dan konversi lahan yang tak terarah dari lahan pertanian sawah irigasi untuk digunakan sebagai lahan perumahan dan perkotaan, yang membutuhkan panduan urbanisasi dengan meminimalkan konversi lahan yang tak terarah.

(2) Kebijakan dan Strategi

Struktur Spasial harus mencerminkan kebijakan pembangunan daerah dan strategi di atas dan

kebijakan dasar untuk tata ruang yaitu: (1) Pembentukan sistem perkotaan yang menarik dan efisien, (2) Peningkatan hubungan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan (3) Menciptakan lingkungan yang berorientasi spasial.

Kebijakan 1: Pembentukan sistem perkotaan yang menarik dan efisien

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 1:

- 1) Membentuk pusat-pusat berdasarkan hirarki kegiatan di pusat regional, pusat kabupaten/kota, pusat distrik tidak hanya di GKS tetapi Jawa Timur termasuk Malang, dan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat regional di setiap kabupaten / kota;
- 2) Merevitalisasi dan mempercepat pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur didukung oleh pusat-pusat pertumbuhan regional dan pusat-pusat pertumbuhan lokal, dan
- 3) Mengembangkan pusat-pusat perkotaan dan daerah sesuai dengan fungsi dan perannya.

Kebijakan 2: Pengembangan sistem keterkaitan pedesaan - perkotaan

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 2:

- 1) Penguatan keterkaitan desa-kota melalui fasilitasi sistem agropolitan;
- 2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah pedesaan sebagai daerah inti;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, khususnya prasarana jalan untuk mendukung sistem agropolitan.

Kebijakan 3: Menciptakan wilayah yang kompak berorientasi lingkungan

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 3:

- 1) Pengendalian penyebaran pertumbuhan perkotaan tak terarah dan menegakkan pedoman arahan urbanisasi melalui sistem zoning penggunaan lahan;
- 2) Fasilitasi keterpaduan jaringan pengembangan perkotaan dan transportasi umum;
- 3) Manajemen dan pengendalian pembangunan perkotaan di pinggiran kota dan pembangunan kembali kota yang layak dalam membangun daerah agar lebih kompak (memadat);
- 4) Penciptaan ruang hijau dan ramah-air dalam kawasan terbangun.

2.6.3 Pembangunan Transportasi

(1) Isu-isu Pembangunan

Pembentukan jaringan transportasi yang komprehensif dan efisien adalah kunci untuk kerangka spasial GKS. Untuk tujuan ini, isu-isu pembangunan yang melatarbelakangi bervariasi, termasuk:

- 1) Meningkatnya kepemilikan kendaraan, sehingga terjadi kemacetan lalu lintas di jalan-jalan yang lebih serius dari hari ke hari;
- 2) Kurangnya jaringan jalan metropolitan yang mampu mengakomodasi kebutuhan lalu lintas yang perlu diantisipasi;
- 3) Kurangnya sistem jaringan transportasi umum yang komprehensif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat;

- 4) Jenuh kapasitas pelabuhan di Tanjung Perak, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 5) Terbatasnya kemampuan fasilitas pelabuhan udara (landasan pacu dan terminal);
- 6) Sistem transportasi pengangkutan barang kurang fungsional.

(2) Kebijakan dan Strategi

Kebijakan 1: Mengurangi kemacetan lalu lintas jalan dengan struktur jaringan jalan yang fungsional

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 1:

- 1) Mengidentifikasi bottle-neck yang menyebabkan kemacetan lalu lintas jalan dan menguranginya dengan penyediaan fasilitas teknik, penegakan hukum lalu lintas dan manajemen permintaan;
- 2) Meningkatkan jaringan jalan metropolitan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas masa depan;
- 3) Menstrukturkan sistem jaringan jalan utama regional;
- 4) Menstrukturkan sistem tol di dalam perkotaan (jalan tol) di Surabaya Metropolitan Area;
- 5) Memperluas sistem tol antar kota (jalan tol) untuk mengintegrasikannya dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan 2: Meningkatkan "Mobilitas Rakyat" melalui sistem transportasi umum yang berfungsi baik

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 2:

- 1) Lebih lanjut meningkatkan dan memperkuat "Sistem Kereta Komuter" dengan meningkatkan kereta api yang ada di Surabaya Metropolitan Area;
- 2) Meningkatkan sistem antar-moda, mengintegrasikan angkutan umum bus dan kereta api;
- 3) Mendorong "Pembangunan berorientasi Transit" dalam hubungan dengan Sistem Kereta Api Komuter.

Kebijakan 3: Struktur sistem transportasi barang fungsional

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 3:

- 1) Penentuan koridor pengangkutan yang terkait dengan pengembangan jaringan jalan utama regional;
- 2) Memperkuat kapasitas fasilitas tarikan / bangkitan barang utama yang berkaitan dengan pelabuhan dan kereta api;
- 3) Relokasi pusat-pusat / fasilitas distribusi barang sejalan dengan peningkatan jaringan jalan tol Metropolitan.

Kebijakan 4: Memperkuat internasional dan domestik "Port Fungsi" untuk mendukung tumbuhnya ekonomi global di Kawasan GKS

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 4:

- 1) Meneliti solusi alternatif yang layak untuk memperkuat kapasitas pelabuhan kontainer untuk memenuhi kebutuhan masa depan dalam jangka panjang dan mengidentifikasi

- solusi terbaik;
- 2) Melakukan pengembangan pelabuhan baru berdasarkan solusi terbaik yang diidentifikasi.

Kebijakan 5: Memperkuat "Fungsi Bandara" internasional dan domestik untuk mendukung tumbuhnya ekonomi global di Kawasan GKS

Strategi untuk Mencapai Kebijakan 5:

- 1) Mempelajari solusi yang layak untuk memperluas kapasitas bandara untuk memenuhi kebutuhan masa depan dalam jangka panjang dan mengidentifikasi solusi terbaik bagi kedua landasan pacu dan terminal di sekitar Bandara Juanda;
- 2) Menerapkan perluasan bandara berdasarkan solusi terbaik yang diidentifikasi;
- 3) Studi lebih lanjut alternatif kedua bandara internasional di Kawasan GKS (Lamongan) untuk memenuhi permintaan jangka panjang.

2.6.4 Pembangunan Prasarana untuk Pengelolaan Air dan Sarana Utilitas

(1) Isu-isu Pembangunan

Prasarana untuk pengelolaan air secara keseluruhan dan utilitas / jasa sanitasi adalah penting untuk mendukung semua jenis aktivitas manusia. Sebuah batas "daya dukung" menjadi batasan pertumbuhan ekonomi. Di antara berbagai masalah-masalah pembangunan, berikut ini adalah yang layak diperhatikan:

Air

- 1) Lemahnya pengelolaan sumber daya air;
- 2) Buruknya pengelolaan sistem penyediaan air dengan kehilangan air yang luar biasa akibat kebocoran;
- 3) Kekurangan air bersih terutama di daerah perkotaan di musim kemarau.

Air Limbah dan Drainase Perkotaan

- 1) Polusi air di sungai-sungai yang disebabkan oleh limbah domestik dan industry;
- 2) Tidak adanya sistem pemantauan kualitas air yang permanen di sungai;
- 3) Banjir selama musim hujan di beberapa daerah pedesaan dan di sepanjang Sungai Bengawan Solo.

Pengelolaan Persampahan

- 1) Tidak adanya strategi jangka panjang yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat untuk pengolahan sampah;
- 2) Kesulitan untuk mendapatkan ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan akhir;
- 3) Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah serius pada Pengelolaan Persampahan, sehingga menyebabkan partisipasi lemah dalam "Gerakan 3R (Reduction, Reuse dan Recycle).

Listrik dan Energi

- 1) Kebutuhan penting untuk pasokan daya yang stabil dan kualitas listrik; dan
- 2) Harapan peningkatan kapasitas pasokan jaringan listrik dalam Provinsi dalam jangka

panjang.

Telekomunikasi

- 1) Ekspektasi pasar yang adil dan pengoperasian yang baik oleh penyedia layanan swasta.

(2) Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi bertujuan untuk peningkatan prasarana pada tingkat pelayanan secara keseluruhan dan jaringan untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan produksi-permintaan dan secara ramah lingkungan, yang meliputi transportasi, suplai air, air limbah dan drainase, listrik dan energi, telekomunikasi, dan pengelolaan persampahan.

Penyediaan Air

Kebijakan: Pasokan air untuk penggunaan non-irigasi dan irigasi, memperbaiki situasi kekurangan air

Strategi:

- 1) Perluasan fasilitas air bersih;
- 2) Peningkatan cakupan pelayanan dan aksesibilitas air untuk ditargetkan menjadi 76% pada 2030 dari 47% pada tahun 2006;
- 3) Memastikan pengelolaan sumber daya air yang tepat untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran dengan meningkatkan fungsi perusahaan publik pengelola sungai, retribusi untuk penggunaan air sungai, dan pengenalan pembiayaan swasta proyek-proyek air, dan seterusnya;
- 4) Mengelola air tanah termasuk sumur dan mata air;
- 5) Mengurangi kehilangan air di sektor penyediaan air, yang lebih dari 30% melalui langkah-langkah berikut:
 - Hemat air dengan menggunakan daur ulang dan efisiensi air;
 - Mempromosikan pengelolaan sisi permintaan untuk melestarikan sumber daya air;
 - Mengenalkan pengalihan sumber air antar Provinsi atau antar kabupaten dari sungai Bengawan Solo dan Umbulan;
- 6) Meningkatkan pengelolaan air melalui reformasi administrasi, seperti pembentukan Badan Regulasi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana antar kabupaten, dan mengenalkan sistem PIS (Performance Indicator System) untuk PDAM dan industri air lainnya.

Air Limbah dan Drainase Perkotaan

Kebijakan: Mempromosikan lingkungan lebih sehat untuk kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan

Strategi:

- 1) Pengelolaan sanitasi dan air limbah yang tepat, yang saat ini di bawah situasi tidak ada pelayanan pembuangan limbah publik, hanya dengan pelayanan pembuangan lumpur septik;

- 2) Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pengendalian Pencemaran, khususnya limbah industri dan kualitas air sungai;
- 3) Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan melalui peningkatan kapasitas saluran drainase, pemeliharaan saluran, dan peningkatan kapasitas tanggap darurat;
- 4) Peningkatan cakupan pelayanan di daerah perkotaan dan pedesaan.

Pengelolaan Persampahan

Kebijakan: Menciptakan masyarakat pendaur ulang dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengurangi limbah, membangun sistem pengelolaan sampah padat yang terorganisir dengan baik

Strategi:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk administrasi, pembiayaan, pengelolaan informasi, dan seterusnya;
- 2) Peningkatan aspek fisik dan teknis pengelolaan sampah, termasuk kontainer sampah, penyimpanan, peralatan transportasi, kapasitas TPA dan sistem manajemen, dan waktu pengangkutan;
- 3) Peralihan paradigma dari "the End-of-Pipe" ke Pendekatan 3R (reduksi, penggunaan kembali, daur ulang);
- 4) Pengenalan Teknologi tepat untuk Pengelolaan Persampahan, termasuk sistem daur ulang dan teknologi canggih;
- 5) Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pengelolaan Persampahan, termasuk rehabilitasi prasarana, peningkatan regulasi dan kapasitas kelembagaan, dan manajemen kurikulum Pendidikan;
- 6) Peningkatan Pengelolaan Data Sistem pengelolaan sampah yang efisien dan efektif;
- 7) Pengenalan Teknologi Baru pengurangan sampah dengan memperhitungkan keterbatasan TPA yang tersedia, termasuk insinerasi.

Listrik dan Energi

Kebijakan: Menciptakan Masyarakat Hemat Energi dan pembesaran kapasitas dengan menggunakan energi dalam cara yang konservatif

Strategi:

- 1) Mempromosi konservasi energi dan penghematan;
- 2) Peningkatan dan penguatan jaringan untuk pasokan daya yang stabil, termasuk transmisi dan sistem distribusi jaringan;
- 3) Fasilitasi "Manajemen Sisi Permintaan"
- 4) Memperketat kontrol terhadap faktor kehilangan non-teknis (tidak teratur / koneksi ilegal, pembenahan meter kWh, dan lainnya).

Telekomunikasi

Kebijakan: Dukungan layanan telekomunikasi oleh operator swasta

Strategi:

- 1) Fasilitasi penyedia jasa telekomunikasi swasta; dan

- 2) Pelaksanaan program untuk Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT).

2.6.5 Pengelolaan Lingkungan

(1) Isu-isu Pembangunan

Tujuan akhir dari rencana tata ruang harus baik untuk mencapai keselarasan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Terdapat anugerah lingkungan yang tak ternilai di kawasan GKS, namun manajemen yang sesuai untuk sumber daya lingkungan sangat diperlukan, dengan mempertimbangkan sumber daya air, hutan, lahan pertanian dan sumber daya pesisir secara khusus.

- 1) Lemahnya pengelolaan sumber daya air;
- 2) Lemahnya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya lingkungan, ekosistem dan kawasan lindung seperti hutan, mangrove dan sumber daya ekologis penting lainnya;
- 3) Lemahnya manajemen bencana untuk kejadian bencana banjir dan tanah longsor;
- 4) Masalah-masalah ekonomi, pemukiman dan lingkungan oleh adanya aliran lumpur Porong;
- 5) Risiko pada area lahan yang luas yang akan terendam akibat pemanasan global dalam jangka panjang.

(2) Kebijakan dan Strategi

Kebijakan: Identifikasi Lingkungan Daerah Sensitif (ESA) dan memberikan penanggulangan kontrol khusus terhadap pembangunan perkotaan dan industri yang tidak tertata

Strategi:

- 1) Melakukan review dari konsep dan hasil analisis dari "Lingkungan Daerah Sensitif (ESA)" yang digambarkan dalam studi ini (lihat Bagian 5.3 dalam laporan ini);
- 2) Penyusunan "Pedoman Manajemen ESA " dalam hal penggunaan tanah dan sumber daya yang terletak di dalam wilayah ESA dan administrasi penerbitan izin;
- 3) Pembuatan dasar hukum ESA yang terkait dengan UU Penataan Ruang serta hukum lingkungan dan hutan yang terkait; dan
- 4) Fasilitasi pengembangan kapasitas bagi para pejabat pemerintah daerah dalam hal tata krama dan penegakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran hukum lingkungan dan peraturan terkait.

3. KERANGKA KERJA SOSIOEKONOMI PENATAAN RUANG UNTUK KAWASAN GKS 2030

3.1 Proyeksi Populasi Penduduk

3.1.1 Alternatif Skenario Pertumbuhan

Dua alternatif skenario pertumbuhan penduduk yang diuji adalah sebagai berikut:

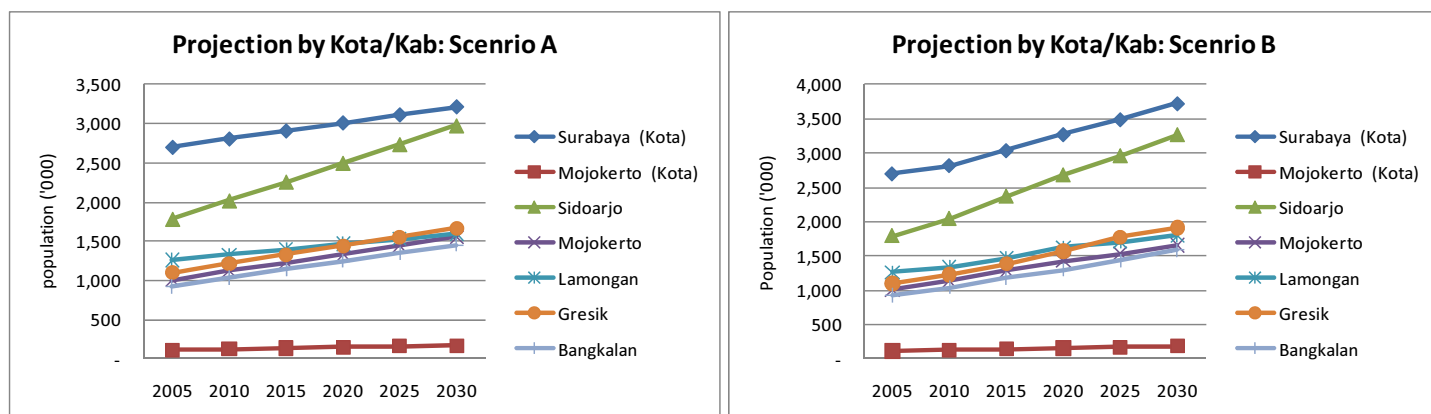
Skenario A (Pertumbuhan Moderat): dengan pengembang di daerah sub-perkotaan, menjaga pertumbuhan penduduk konservatif di Surabaya (Berdasarkan estimasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur), terkait dengan Skenario Ekonomi A dimana GKS akan menjaga posisi ekonomi yang sama bersama dengan pertumbuhan nasional dalam tingkat yang moderat; dan

Skenario B (Pertumbuhan yang Didorong): dengan mengelola proses urbanisasi yang intensif di daerah pertumbuhan strategis di Surabaya Metropolitan Area, menarik pendatang sosial dari daerah lain (berdasarkan analisis oleh Tim Studi JICA), terkait dengan Skenario Ekonomi B, yang akan mendorong GKS sebagai pelopor ekonomi menuju tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Skenario ini digambarkan berdasarkan konsep nasional bahwa perekonomian regional diperkuat lebih lanjut dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya.

3.1.2 Kerangka Kerja Populasi

Skenario A (Pertumbuhan Moderat) menunjukkan bahwa penduduk GKS pada tahun 2030 akan mencapai 12.645.000 jiwa, dimana diperkirakan populasi Surabaya untuk akan mencapai 3.212.900 jiwa, diikuti oleh Sidoarjo dengan 2.977.400 jiwa. Dalam skenario ini, penduduk Surabaya akan meningkat pada tingkat minimal, 0,6 -0,7% per tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional, yang berarti bahwa penurunan sosial (atau migrasi keluar) akan berlangsung.

Sementara, **Skenario B (Pertumbuhan yang Didorong)** menunjukkan bahwa populasi GKS akan mencapai 14.117.500 jiwa pada tahun 2030, dimana Surabaya akan mencapai 3.723.700 jiwa, diikuti oleh Sidoarjo dengan 3.257.400 jiwa. Kedua kota ini akan mendominasi aglomerasi perkotaan Metropolitan GKS. Populasi di GKS 2008-2030 akan meningkat menjadi sekitar 4,8 juta jiwa. Dalam skenario ini, penduduk Surabaya akan meningkat sebesar 1,3-1,5% per tahun. Di masa depan, dengan cara sedemikian rupa bahwa penurunan sosial akan diminimalkan dan lebih menarik orang-orang bersama dengan ekonomi yang didorong.



Gambar. 3.1 Proyeksi Penduduk menurut Skenario

3.2 Skenario Pengembangan Ekonomi

3.2.1 Kerangka Kerja Nasional dan Regional

Perspektif pertumbuhan ekonomi di proyeksikan dalam dua buah scenario. Perkiraan pertumbuhan di GKS, GKS+plus, Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan dalam Tabel 3.2.1. Ekonomi Indonesia telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini padahal keadaan krisis ekonomi dunia dan keuangan sedang terjadi. Bagaimanapun, melihat pada keadaan di masa depan, kenaikan pertumbuhan ekonomi semacam ini akan menjadi tersaturasi pada tingkat tertentu, anggap saja 2.0-3.0%p.a.

Skenario A (Skenario Pertumbuhan Moderat): Posisi komparatif di GKS tidak akan secara signifikan berubah di masa depan, atau konstan melewati batas waktu, yakni tetap di level 6.5%. Sedangkan.

Skenario B (Skenario Pendorongan Pertumbuhan): Posisi komparatif GKS terhadap ekonomi nasional akan meningkat ke level 7.0%, walaupun scenario ekonomi ini mengasumsikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada rating pertumbuhan ekonomi di Skenario A. Ini berarti bahwa ekonomi GKS akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan strategis nasional di Skenario B.

Table 3.2.1 Skenario Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Skenario A: Pertumbuhan Moderat (Seiring Pertumbuhan Nasional)									
Scenario A: Moderate Growth (Getting along with the National Growth)									
	2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020	2025	2030
GKS	7.1%	6.3%	6.4%	5.9%	4.7%	4.3%	3.5%	3.0%	2.7%
GKS Plus	6.6%	7.1%	8.0%	8.0%	4.3%	4.6%	3.7%	3.1%	2.7%
East Java	5.8%	5.8%	6.1%	5.9%	4.2%	4.0%	3.4%	2.9%	2.5%
Rest of Java	5.8%	5.8%	6.1%	5.9%	3.7%	3.7%	3.1%	2.7%	2.4%
National Total	5.7%	5.5%	6.3%	6.1%	4.8%	4.3%	3.5%	3.0%	2.6%
Skenario B: Pertumbuhan Terdorong (Memimpin Pertumbuhan Ekonomi Nasional)									
Scenario B: Pushed Growth (Leading Economy of the National Growth)									
	2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020	2025	2030
GKS	7.1%	6.3%	6.4%	5.9%	5.8%	5.6%	5.0%	3.8%	3.5%
GKS Plus	6.6%	7.1%	8.0%	8.0%	5.9%	5.8%	4.8%	3.5%	3.5%
East Java	5.8%	5.8%	6.1%	5.9%	6.0%	5.0%	4.0%	3.5%	3.2%
Rest of Java	4.6%	5.1%	5.5%	5.5%	6.2%	5.4%	4.2%	3.6%	3.5%
National Total	5.7%	5.5%	6.3%	6.1%	6.0%	5.0%	4.0%	3.5%	3.2%

3.2.2 Kerangka Kerja Ekonomi GKS : Angka Pertumbuhan & PDRB pada Harga Konstan (Tahun 2000)

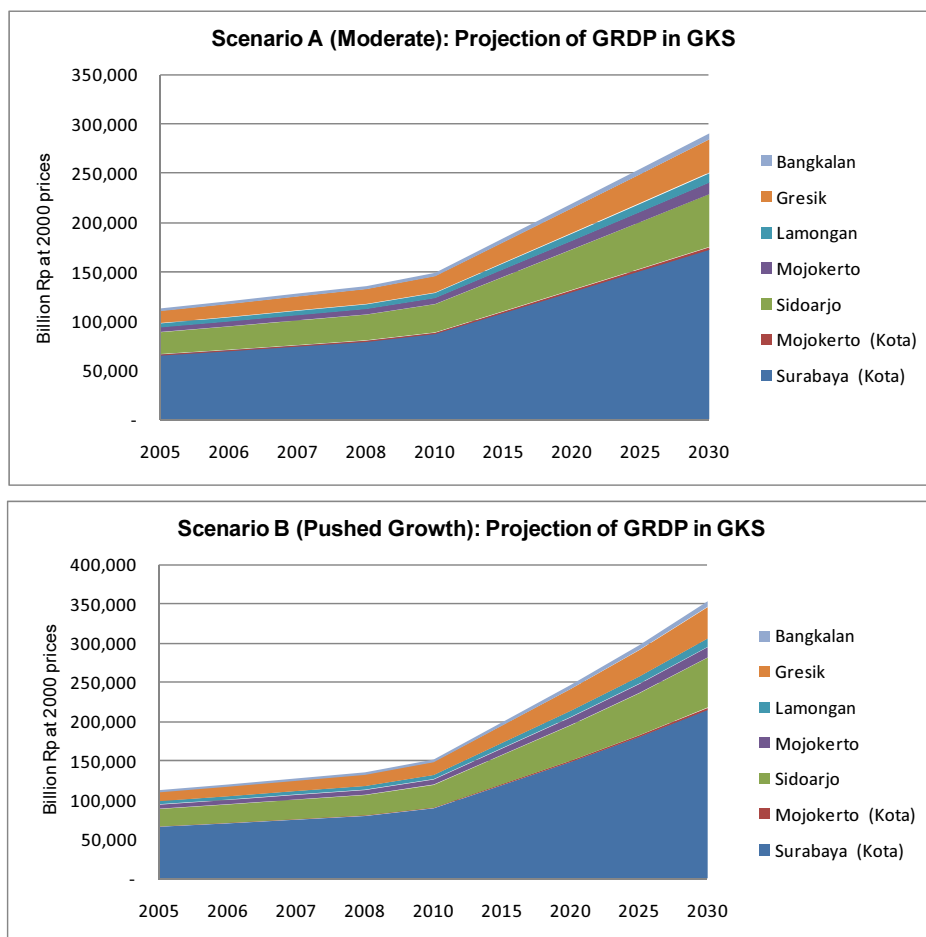
Pertumbuhan ekonomi dalam hal PDRB di GKS sebelumnya diasumsikan untuk jangka panjang. Dalam beberapa tahun 2007-2008, angka pertumbuhan tertinggi (6.8% p.a.) ditemukan di Gresik, dan diikuti Surabaya (6.3% p.a.), Lamongan (5.9% p.a.) and Mojokerto (5.5% p.a.). Pertumbuhan ekonomi secara umum sebagian besar ter-relasi kepada aktivitas industri dan akumulasi jasa perkotaan. Dengan demikian, derajat proses industrialisasi adalah satu dari criteria untuk mengevaluasi potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Angka proyeksi, di **Skenario A**, diambil dari "Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Jawa Timur, 2008" yang menjunjung pertumbuhan moderat.

Sedangkan untuk **Skenario B**, angka pertumbuhan untuk tiap Kabupaten/Kota di teliti oleh tim studi JICA, membawa kedalam sumbangsih kepada prosesi tani dan penghargaan kebun sama

seperti potensi industrialisasi ke depan. Berkaitan dengan itu, diasumsikan bahwa 3 ekonomi Surabaya, Gresik dan Sidoarjo akan secara terus menerus berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, diikuti oleh Mojokerto dimana diharapkan aktivitas prosesi tani semakin maju di masa depan.

Gambar 3.2.1 mengindikasikan proyeksi jangka panjang daripada PDRB pada harga konstan tahun 2000 di GKS dalam 2 skenario.



Sumber: Tim Study JICA

Gambar. 3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan GKS berdasarkan Skenario

3.2.3 Pertumbuhan PDRB per Kapita di Kawasan GKS

Perubahan daripada “PDRB per kapita pada harga konstan 2000” adalah sebagaimana indeks kekayaan orang, di teliti sampai kepada tahun 2030. PDRB per kapita di GKS adalah Rp.13.7 juta pada tahun 2008, dan akan bertambah sampai Rp.20.1 juta untuk Skenario A, dan Rp.21.0 juta dalam Skenario B in 2030. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua skenario dapat ditemukan, karena bertambahnya populasi bersamaan dengan kenaikan aktivitas ekonomi di Skenario B. Pendapatan penduduk akan naik 1.53 kali daripada di tahun 2008.

3.2.4 Keterkaitan Kerangka Kerja Penataan Ruang

Penataan ruang , diatur berdasarkan scenario pertumbuhan seperti yang dijelaskan di atas. Skenario pertumbuhan tertinggi, atau **Skenario B (Pertumbuhan Terdorong)**, akan membantu untuk kesejahteraan rakyat dan stabilitas kepegawaian. Bagaimanapun, pada saat yang

bersamaan, hal ini akan membawanya kepada pembebanan lingkungan, kemacetan, dan harga jasa layanan umum pada masyarakat, jika perhitungan yang tepat tidak diantisipasi. Maka dari itu, keseimbangan penataan ruang harus didukung dengan penetapan minimalisir dampak negatif.

Sebagai hasil dari analisa seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2.2, **Skenario B** atau **Skenario Pertumbuhan yang Terdorong** di terapkan dalam kerangka kerja sosio ekonomi dalam perencanaan tata ruang, karena zona GKS akan menjadi wilayah dengan ekonomi yang maju di Indonesia, yang berkaitan dengan isu kebijakan penting untuk mewujudkan pertumbuhan nasional secara merata. GKS merupakan wilayah ekonomi terbesar kedua dengan potensi yang sangat besar untuk pembangunan sosial dan ekonomi, sebagai pusat wilayah tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk bagian timur wilayah Indonesia. Potensi yang besar ini harus dirangsang untuk mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan struktur pembangunan yang seimbang dan merata. Demi tujuan ini, Skenario B dinilai sebagai skenario yang paling sesuai untuk kerangka kerja perencanaan tata ruang.

Tabel 3.2.2 Perbandingan dan Evaluasi dari Skenario-Skenario Alternatif

	Skenario A (Pertumbuhan Moderat)	Skenario B (Pertumbuhan yang Terdorong)
Posisi perekonomian dari zona GKS atas perekonomian nasional tahun 2030	Relatif sama dengan posisi saat ini	Menjadi wilayah dengan ekonomi terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
Proses Urbanisasi	Mempertahankan proses urbanisasi secara terus-menerus dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya (sub-urbanisasi)	Pengendalian urbanisasi dengan intensifikasi wilayah yang dibangun dan meminimalkan wilayah perkotaan yang tidak beraturan/ urban sprawl (konsep kota yang rapih/compact city concept)
Pertumbuhan Ekonomi	Moderat	Sedikit progresif
Beban Lingkungan	Meningkat sejalan dengan tekanan pembangunandan proses urbanisasi.	Perlu untuk menetapkan sistem manajemen yang lebih praktis untuk mengurangi dampak negatif lingkungan

Sumber: Tim Studi JICA

4. STRUKTUR RUANG KAWASAN GKS

4.1 Sistem Perkotaan

4.1.1 Review RTRW Provinsi Jawa Timur

Pada dasarnya, struktur ruang wilayah yang luas yang digambarkan dalam RTRW Provinsi Jawa Timur harus diadopsi sebagai rencana tata ruang yang lebih tinggi, dimana Rencana Tata Ruang Kawasan GKS harus konsisten terhadapnya.

Penggunaan terbaik aset Surabaya dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi pembangunan dan misi dari kawasan GKS dibawah tujuan "Pengembangan Struktur Ruang Wilayah dan Kota Kawasan GKS" sebagai berikut:

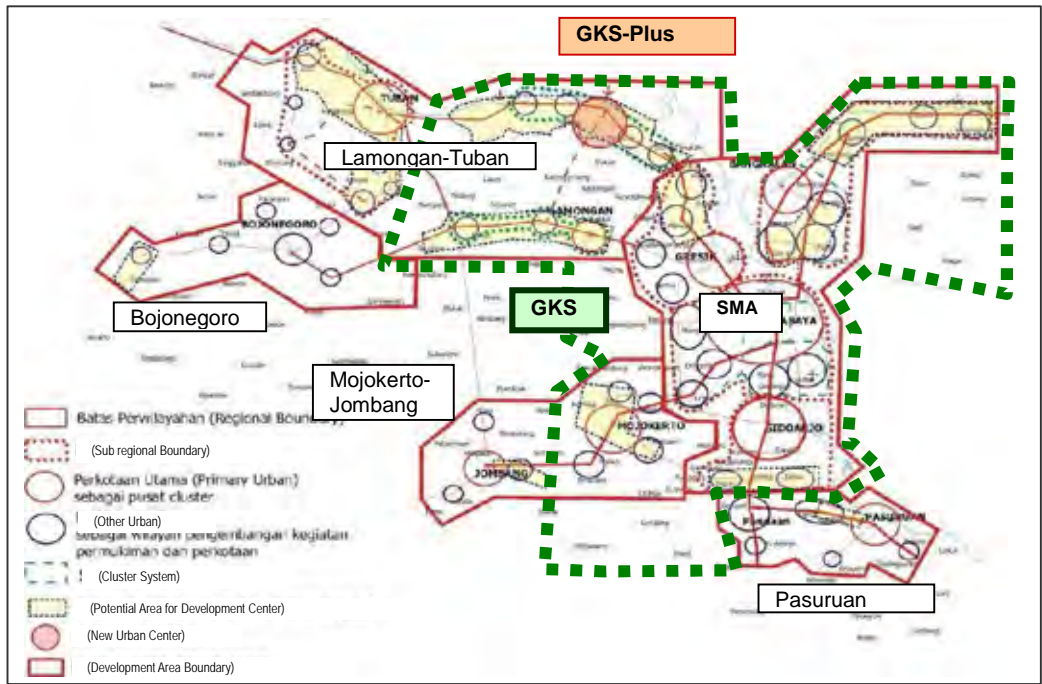
- Untuk membentuk struktur ruang untuk mencapai pembangunan yang berimbang di Kawasan GKS;
- Untuk membuat deliniasi yang jelas untuk kawasan lindung dan budidaya untuk pemanfaatan lahan yang berkelanjutan di Kawasan GKS; dan
- Untuk mengelola pertumbuhan perkotaan dengan menciptakan "kota kompak dan berorientasi lingkungan" untuk menghindari urbanisasi yang tidak terkendali.

(1) Sistem Zona Pembangunan yang Direncanakan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur

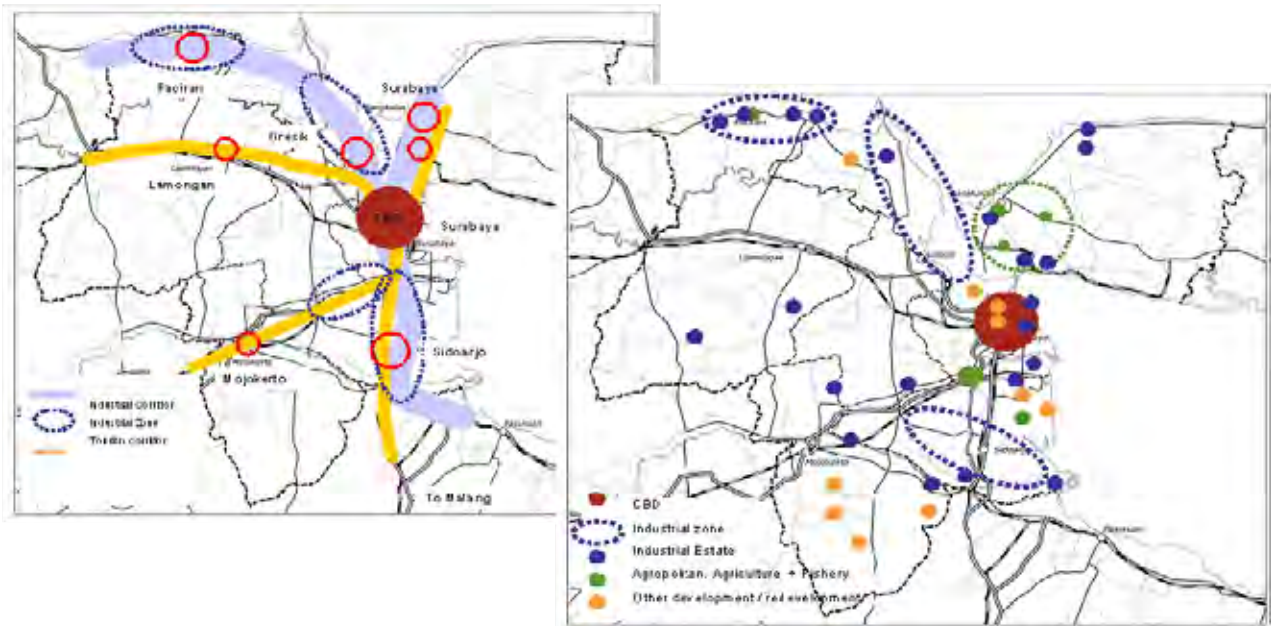
Ada beberapa kombinasi kawasan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1.1, yang menunjukkan hubungan dengan kawasan pembangunan lainnya. Kawasan GKS merupakan bagian dari Kawasan GKS-Plus. Dalam Kawasan GKS, hirarki pusat di GKS dikategorikan dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Surabaya (Pusat layanan, perdagangan, industri, pemukiman, pendidikan, dll)
- Tingkat 2: Sidoarjo, Gresik, Bangkalan (Sub-pusat di SMA sebagai pusat layanan untuk perdagangan, industri dan pendidikan)
- Tingkat 3: Lamongan (Pertanian, Industri, Pariwisata), Kabupaten Mojokerto (Jasa, Pertanian, Perdagangan), Kota Mojokerto (Dagang, Jasa, Pemerintah)

Kabupaten dan Kota diarahkan pada sektor-sektor strategis dan utama, pengembangan industri, pengembangan pariwisata, pengembangan *agropolitan*, dan pembangunan strategis lainnya yang tercermin dalam konsep pengembangan distribusi spasial dan koridor. Rencana tersebut berfokus pada pengembangan industri, terutama di sepanjang koridor pembangunan industri seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1.2. Kawasan GKS memiliki potensi pengembangan industri yang kuat, yang tercermin dalam struktur spasial, seperti diringkas pada Tabel 4.1.1.



Gambar. 4.1.1 Komposisi Kawasan GKS dan GKS Plus di RTRW Jawa Timur



Gambar. 4.1.2 Koridor dan Kawasan Industri Strategis di Kawasan GKS

Tabel 4.1.1 Peran Kawasan GKS dalam Pengembangan Regional

Kota/Kab	Sistem Jaringan Kawasan
Surabaya	Melayani sebagai pusat pengumpul, begitu juga dengan distribusi dan manufaktur di sub-pusat
Lamongan	Melayani sebagai pengumpul dan distribusi sub-pusat, sub-pusat untuk memproses industri di LIS (<i>Lamongan Integrated Shorebase</i>) di daerah Paciran dan untuk pengembangan wisata di Paciran. Sub-pusat yang lebih kecil akan melayani area.
Gresik	Melayani sebagai pengumpul dan pendistribusi, begitu juga dengan proses industri di sub-pusat. Sub-pusat yang lebih kecil akan melayani area.
Sidoarjo	Melayani sebagai pengumpul dan pendistribusi, begitu juga dengan manufaktur sub-pusat. Sub-pusat yang lebih kecil akan melayani area.
Mojokerto	Melayani sebagai pengumpul dan pendistribusi, begitu juga dengan proses industri di sub-pusat. Sub-pusat yang lebih kecil akan melayani area.
Bangkalan	Melayani sebagai sub-pusat untuk pengumpul dan pendistribusi (di Bangkalan), perdagangan dan jasa (di Labang pada kaki Jembatan Suramadu), industri (di Kamal, Labang, Tragah, Burneh dan Socah), dan pengembangan wisata (di pantai selatan Bangkalan). Sub-pusat yang lebih kecil akan melayani daerah.

Sumber: RTRW Jawa Timur

(2) Arahannya Pembangunan oleh Kota/Kabupaten di Kawasan GKS

Melihat potensi pengembangan regional dan arahan Kawasan GKS, semua wilayah Kabupaten dan Kota di dalam Kawasan GKS mengembangkan industri dan daerah inti lainnya, dan masing-masing memiliki strategi sendiri sebagaimana diringkas dalam Tabel 4.1.2, termasuk pengembangan pembangunan kawasan industri, agropolitan, pembangunan perikanan terkait, dan pembangunan lainnya.

Tabel 4.1.2 Ringkasan Arahan Pembangunan yang Direncanakan di dalam RTRW Provinsi Jawa Timur

	Sektor Pembangunan Strategis	Sektor Utama	Industri	Agropolitan	Pariwisata	Kawasan Strategis Lainnya
Surabaya	Pembangunan KKJS sisi Surabaya; Pembangunan Pelabuhan	Jembatan Suramadu; Pergudangan	SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut); Kawasan Industri ber Teknologi Tinggi	Pusat Pemasar utama	Koridor Pintu Gerbang Utama, Pusat Jasa dg Pertumbuhan Tinggi	Pusat CBD Surabaya Metropolitan utk Pasar Nasional & Internasional termasuk KKJS
Sidoarjo	EJIIZ: Industri Berpolusi (Jabon), Terminal Kargo Kota; Pembangunan Terminal Agrobisnis	Industri, Perdagangan' Perikanan	Kawasan Industri Sidoarjo (Hi-tech) Kawasan Industri Berbek	Pembangunan terminal agrobisnis	Koridor A	Kawasan Porong-Gempol, Kawasan Perdagangan Puwodadi-Lawang
Gresik	EJIIZ: Industri Berat, Industri Pelabuhan + Bonded zone, Industrial Estate, Bonded Zone, City Cargo Terminal (2), EPZ	Kawasan Industri Perikanan	Kawasan Industri Gresik, Kawasan Industri Teknologi Tinggi Gresik (Surabaya Barat).		Koridor A, Pertumbuhan Tinggi	
Kota Mojokerto	-	Perdagangan dan Jasa utk melayani Lokal			Koridor B	
Mojokerto	-				Koridor B	
Bangkalan	Pengentasan Kemiskinan Pulau Madura; EJIIZ: Pelabuhan Internasional & Bonded Zone; Pembangunan KKJS sisi Madura	Industri & Transportasi, Pergudangan di Jembatan Suramadu	Industri Terpadu sumber daya Lokal (teknologi dan bahan) untuk kesinambungan industri-industri di Pulau Madura	Pusat Hubungan dan Distribusi Regional (RDCC) di Bangkalan, untuk mencukupi kebutuhan seluruh Pulau Madura	Koridor A Pintu Gerbang (Jembatan Suramadu)	Pusat Pasar Nasional & Internasional di KKJS
Lamongan	EJIIZ: Paciran: Industri Perikanan, dan industri pengolahan non-polusi, pengembangan pelabuhan, Industrial Estate, pengembangan industri Minyak & Gas	Industri berbasis kelautan, Pelabuhan perikanan, Perikanan pesisir utara	Industri Terpadu = sumber daya berbasis industri lokal (teknologi dan bahan) untuk keterkaitan industri dengan FTZ & Pelabuhan		Koridor A Pusat pelayanan & Pintu Gerbang (Paciran)	FTZ

Catatan: EJIIZ=East Java Integrated Industrial Zone

Koridor Pembangunan Pariwisata A = 3 rute ke Lamongan – Gresik – Surabaya; Surabaya – Bangkalan; Surabaya – Sidoarjo – Malang untuk Wisata Religi;

Koridor B = Koridor (Surabaya –Mojokerto – Jombang-Madiun untuk Wisata Sejarah

4.1.2 Usulan Sistem Hirarki Perkotaan

Berdasarkan struktur ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur, struktur ruang dibentuk sebagai wilayah multi-pusat dengan urutan hirarki pusat pengembangan sebagai berikut:

Tingkat 1:	Pusat Regional	Surabaya
Tingkat 2:	Pusat SMA	Sidoarjo, Gresik, and Bangkalan (20km radius from Surabaya)
Tingkat 3:	Pusat Kabupaten	Mojokerto, Lamongan, (40km radius from Surabaya)
Tingkat 4:	Sub-pusat GKS	Paciran, Babat (Lamongan); Sidayu (Gresik); Gempol (Sidoarjo); Tanah Merah, Klampis, Tj. Bumi (Bangkalan)
Tingkat 5:	Sub-pusat SMA	Menganti (Gresik); Krian (Sidoarjo); Labang (Bangkalan)
Tingkat 6:	Sub-pusat Kabupaten Lainnya	Brondong (Lamongan); Manyar, Cerme, Driyorejo (Gresik); Tarik, Sedati (Sidoarjo); Sooko, Mojosari, Ngoro (Mojokerto); Sochah (Bangkalan)
Lainnya	Pintu Gerbang Intermoda	Tambakoso Wilangan (Greik); Sepanjang & Waru (Sidoarjo)

Secara konseptual telah diakui bahwa area dalam radius 20 km dari pusat Surabaya membentuk SMA (Surabaya Metropolitan Area), dan bahwa keterkaitan dengan pusatnya menyebar ke daerah-daerah sekitar radius 40 km dari Surabaya, yang mencapai sampai Lamongan dan Mojokerto, dan Bangkalan, dan juga bahkan Pasuran di luar Kawasan GKS. Keadaan ini dapat disebut ***"Kawasan Integrasi Ekonomi Surabaya Raya"***.

Pusat-pusat wilayah luar GKS dengan beberapa proyek strategis, sub-sub pusat GKS dan sub-sub pusat SMA, dan Kabupaten lainnya terletak di lokasi yang menguntungkan dan strategis di lihat dari titik-titik simpul transportasi atau sepanjang koridor industri dalam kawasan GKS. Selain itu, ada pintu gerbang antar moda akan didirikan di pinggiran simpul dapat menghubungkan Surabaya dengan Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo.

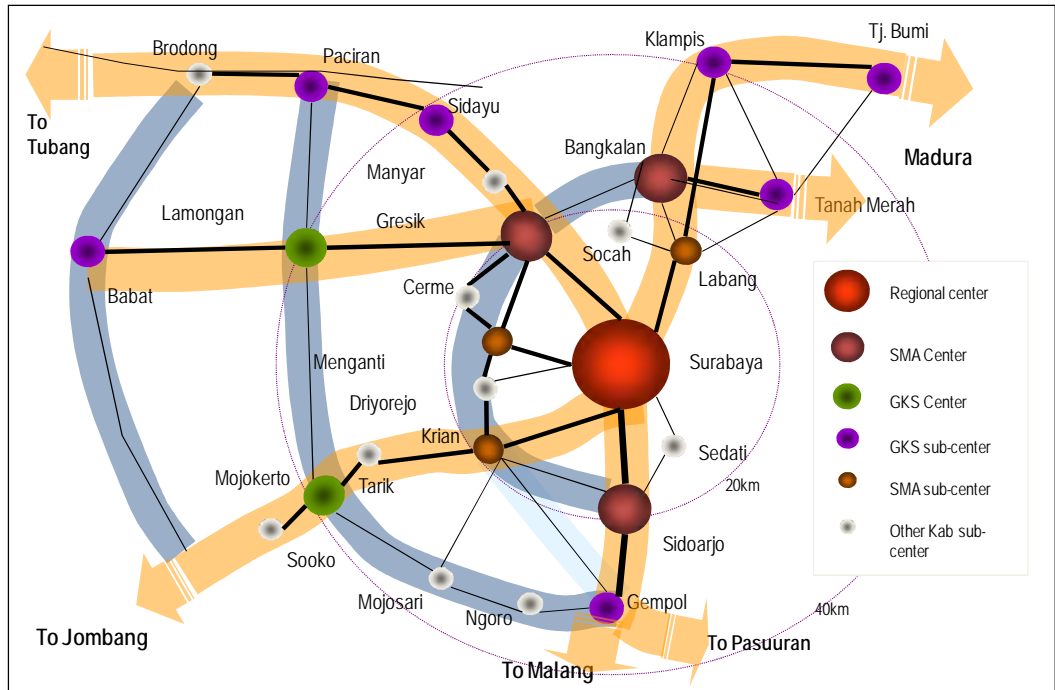
Setiap pusat perkotaan memiliki peran dan fungsinya dalam konteks regional, seperti yang dirangkum dalam Tabel 4.1.3. Dengan pusat-pusat perkotaan, GKS harus terstruktur secara konseptual sebagai diilustrasikan pada Gambar 4.1.3. Perlu dicatat bahwa pusat-pusat perkotaan strategis semua terstruktur di dalam lima (5) koridor industri radial berpusat di Surabaya dan tiga (3) koridor melingkar untuk mengintegrasikan secara fungsional dengan pusat pinggiran kota. Gambar 4.1.4 memperlihatkan usulan sebuah sistem hirarki perkotaan pada jaringan jalan, dan pusat-pusat administrasi utama yang terletak di dalam struktur ruang. Perlu dicatat bahwa Pusat-pusat Tingkat 3 Kabupaten Lamongan dan Mojokerto ditandai sebagai pusat agropolitan.

Tabel 4.1.3 Peran dan Fungsi Pusat Perkotaan Utama di Kawasan GKS

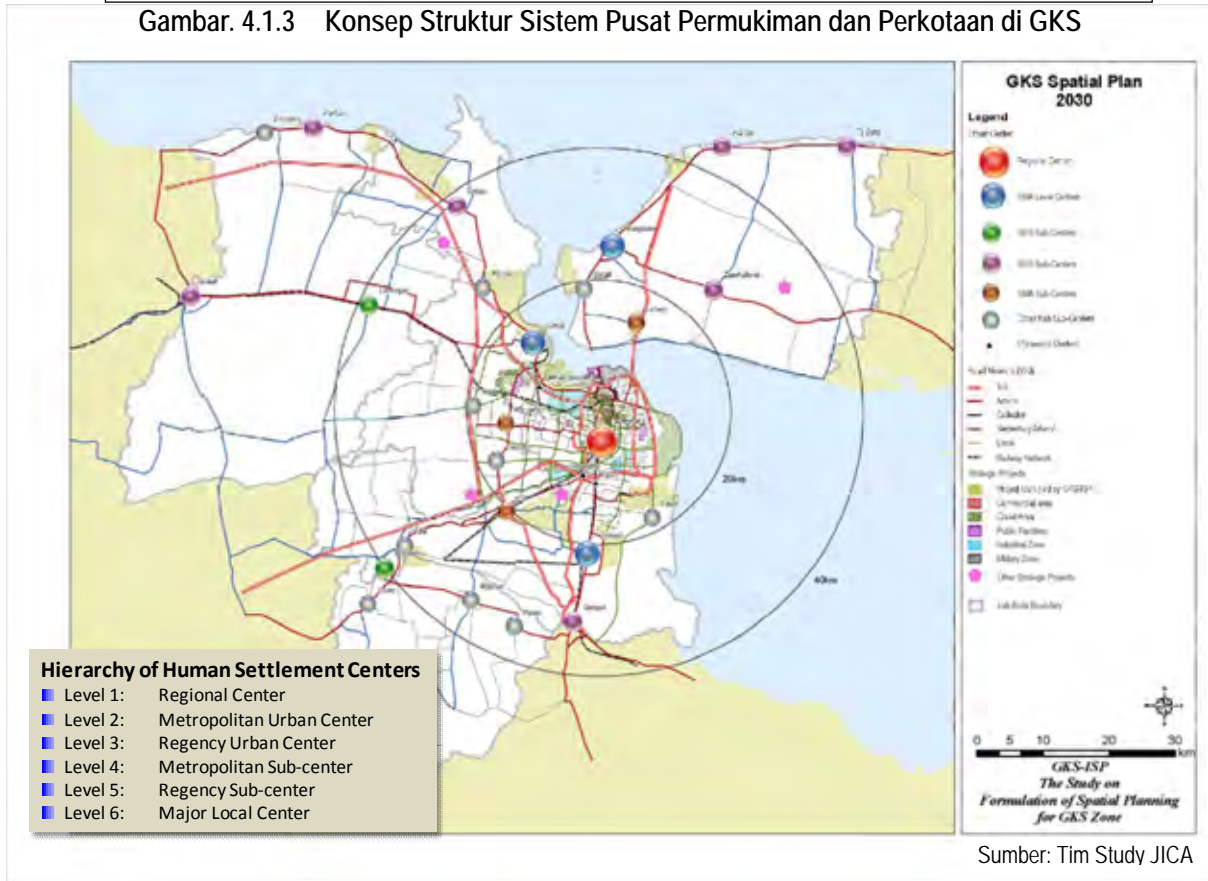
Pusat		Peran dan Fungsi
Tingkat 1: Pusat Regional	Surabaya	Pusat Perkotaan Utama, Pintu Gerbang dan citra wilayah kota ke luar Kawasan GKS, menjadi Pusat Regional kegiatan politik, administrasi, ekonomi dan sosial, dengan fungsi yang lebih tinggi untuk aspek-aspek bisnis, jasa, pendidikan, kesehatan dan komersial, administrasi, dan budaya-pariwisata
Tingkat 2: Pusat Perkotaan Metropolitan	Sidoarjo	Pusat Perkotaan Metropolitan dengan fungsi yang lebih tinggi dari pelayanan industri dan komersial, dan didukung oleh pendidikan, kesehatan dan pariwisata, dengan hubungan yang kuat dengan Surabaya dan Pasuruan untuk meningkatkan perekonomian
	Gresik	Pusat Perkotaan Metropolitan SMA utara dengan kegiatan industri dan komersial, dan didukung oleh pendidikan, kesehatan dan pariwisata, dengan hubungan yang kuat dengan kawasan ekonomi Surabaya, Lamongan dan Paciran / Brondong
	Bangkalan	Pusat Perkotaan Metropolitan Pulau Madura untuk mengakomodasi perekonomian pulau; dengan aktivitas utama untuk agroindustri, pendidikan, komersial, didukung oleh kesehatan dan pariwisata serta pemerintahan.
Tingkat 3: Pusat Perkotaan GKS	Kota Mojokerto	Pusat Perkotaan GKS untuk menampung wilayah Mojokerto dan Jombang dengan hubungan yang kuat antara Jombang dan Surabaya dengan jalan raya; dan pusat agribisnis serta kegiatan sentra industri dan komersial; didukung dengan pendidikan, pariwisata dan kesehatan.
	Lamongan	Pusat Perkotaan GKS untuk mengakomodasi ekonomi daerah berbasis pertanian, dengan hubungan yang kuat dengan Surabaya, Paciran / Brondong, Babat, Bojonegoro, dengan kegiatan pendukung untuk perdagangan dan jasa, kesehatan, industri dan pariwisata.
Tingkat 4: Sub-pusat Metropolitan	Labang (Bangkalan)	Sub pusat Metropolitan dengan pembangunan perdagangan dan jasa di kaki Jembatan Suramadu, selain industri dan pergudangan, pertanian dan peternakan.
	Menganti (Gresik)	Sub pusat Metropolitan sebagai pusat pengembangan pemukiman di daerah pinggiran perkotaan di sepanjang jalan transportasi kereta api dan truk, didukung dengan pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
	Krian (Sidoarjo)	Sub-pusat Metropolitan untuk industri dan permukiman dari pembangunan kawasan industri Siborian, selain perdagangan dan jasa dan pertanian.
Tingkat 5: Sub-pusat GKS	Sidayu (Gresik)	Sub pusat GKS sebagai waterfront city dengan pengembangan industri di sekitar Sungai Bengawan Solo.
	Paciran (Lmgn.)	Sub pusat GKS sebagai zona ekonomi khusus yang terdiri dari industri, pelabuhan, logistik dan pengembangan pariwisata dengan pencegahan kerusakan lingkungan; dengan aktivitas utama lainnya: perdagangan, jasa, industri besar dan industri shorebase, dan pendidikan.
	Babat (Lmgn.)	Sub pusat GKS di antara Lamongan dan perbatasan ke Tuban, dengan kegiatan utama untuk perdagangan, jasa, agroindustri, dan konservasi sumber daya air.

	Gempol (Sidoarjo)	Sub pusat GKS yang terletak di koridor Pasuruan dan Malang
	Tanah Merah (Bangkalan)	Sub-pusat GKS untuk kegiatan pertanian, khususnya ternak dan unggas, dan fungsi agropolitan
	Klampis (Bangkalan)	Sub pusat GKS untuk pelabuhan internasional di Pelabuhan Tanjung Bulupandan yang direncanakan untuk memainkan peran penting dalam transportasi kargo dalam jangka-panjang, dengan pengembangan daerah pinggiran untuk industri dan gudang, pariwisata, pertanian dan perikanan
	Tj. Bumi (Bangkalan)	Sub pusat GKS sebagai angkutan laut, perdagangan dan jasa, dan industri lokal, pertanian, peternakan, dan juga menghubungkan bagian timur Pulau Madura
Tingkat 6: Pusat Utama Lokal	Brodong (Lmngn)	Pusat utama lokal dengan pelabuhan perikanan nasional
	Manyar(Gresik)	Pusat utama lokal dengan a pembangunan industry besar
	Cerme (Gresik)	Pusat utama lokal dengan pembangunan permukiman untuk mengakomodasi peningkatan jumlah populasi penduduk sepanjang jalan arteri
	Driyorejo (Gresik)	Pusat utama lokal dengan pembangunan permukiman dan industri
	Socah (Bangkalan)	Pusat utama lokal dengan pembangunan pelabuhan dan kawasan pinggiran
	Tarik(Sidoarjo)	Pusat utama lokal dari pembangunan permukiman kota water front
	Sedati (Sidoarjo)	Pusat utama lokal dari Kota Marina dan Gemopolis yang direncanakan dekat dengan Bandara Internasional Juanda
	Sooko (Mjikt)	Pusat utama lokal dari industry non-polutif dan pusat permukiman
	Mojosari (Mjikt.)	Pusat utama lokal dengan an pembangunan permukiman dan industri
	Ngoro (Mjikt)	Pusat utama lokal dengan an pembangunan Industrial estate
Pintu Gerbang Intermoda	Tambakoso Wilangon (Gresik)	Pusat pintu gerbang Intermoda yang menghubungkan Lamongan dan Surabaya
	Waru (Sidoarjo)	Pusat pintu gerbang Intermoda yang menghubungkan Sidoarjo dan Surabaya
	Sepanjang (Sidoarjo)	Pusat pintu gerbang Intermoda yang menghubungkan Mojokerto dan Surabaya

Sumber: Tim Studi JICA



Gambar. 4.1.3 Konsep Struktur Sistem Pusat Permukiman dan Perkotaan di GKS



Sumber: Tim Study JICA

Gambar. 4.1.4 Struktur Ruang Pusat Perkotaan Strategis dan Jaringan Jalan di GKS

4.1.3 Strategi Pembangunan Perkotaan dan Pusat-pusat Fungsional

(1) Central Business District (CBD): Pusat Surabaya

CBD Surabaya adalah pintu gerbang kawasan GKS. Kawasan ini memiliki berbagai layanan metropolitan di tingkat internasional, menjadi lebih menarik dan jelas dengan pengaturan ulang kepadatan kawasan perkotaannya. Untuk tujuan ini, area terbangun yang padat harus dibangun kembali menjadi kawasan pusat perkotaan yang lebih menarik. Kegiatan pembangunan kembali tersebut, bersama dengan Jembatan Suramadu, akan membentuk Surabaya menjadi daerah tujuan bisnis internasional dan wisata, dengan fungsi untuk MICE (Meeting, Insentif, Konvensi dan Event / Pameran).

Kemacetan lalu lintas akan lebih buruk tanpa rencana perbaikan transportasi yang tepat termasuk manajemen lalu lintas dan lalu lintas menenangkan. Selain perbaikan lingkungan bisnis, kondisi hidup di daerah pusat kota Surabaya juga penting ditingkatkan kualitasnya.

(2) Ekisting Kawasan Terbangun di sekitar CBD

Daerah built-up yang ada di Surabaya sangat padat dan kurang fasilitas perkotaan, khususnya fasilitas pendidikan dan ruang terbuka hijau dan taman dan mungkin jalan akses / feeder. Dalam kawasan ini, perbaikan kondisi hidup merupakan prioritas utama, terutama dalam menciptakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendidikan. Untuk tujuan ini, proyek-proyek pembangunan kembali sebagian atau proyek land readjustment harus direncanakan dalam suatu pendekatan bottom-up dan partisipatif.

(3) Pembangunan Kawasan Pinggiran Kota Surabaya

Kawasan pinggiran kota adalah garis depan urbanisasi dan membutuhkan kontrol yang hati-hati untuk menghindari apa yang disebut penyebaran tak terarah dan kontrol yang tepat atau panduan daripada pembangunan baru untuk penyediaan fasilitas umum yang cukup dan lingkungan hidup yang baik, sehingga membuat daerah perkotaan sekompak mungkin.

Kawasan ini menyebar keluar termasuk Sidoarjo dan Gresik, dan Mojokerto khususnya daerah radius 20 km dari Surabaya dan zona yang dalam wilayah Komuter ke Surabaya. Pembangunan kota baru diharapkan dapat memberikan suatu kawasan perumahan yang berkualitas dan tempat kerja bersama dengan perkembangan industri di dekatnya. Kawasan ini juga diharapkan untuk melayani sebagai simpul transportasi dengan fungsi logistik dan pertukaran antar moda.

(4) Sub-Pusat GKS dan SMA

Setelah Surabaya, sub-pusat GKS memiliki peran yang sangat penting untuk menyediakan pelayanan kota seperti bisnis, perdagangan komersial, dan lain-lain, ke tingkat sub-regional, yang menghubungkan Surabaya dengan pusat-pusat kota lainnya dengan kawasan pinggirnya. Sub-pusat ini akan berfungsi sebagai bagian-bagian / peranan penting dari Ekonomi Terpadu Surabaya Raya. Sub-pusat ini harus dihubungkan dengan jaringan transportasi yang dibentuk dengan baik.

(5) Kawasan Industri

Sedangkan untuk kawasan industri yang ada, perlu pencegahan dampak lingkungan eksisting yang buruk melalui: (i) pembentukan cluster industri untuk menanganinya secara kolektif, dan / atau (ii) industri yang mencemari pindah dari kawasan terbangun.

Pada masa depan, luas lahan yang sangat besar perlu dikembangkan untuk lokasi industri

baru. Berdasarkan rencana penggunaan lahan RTRW Kabupaten dan Kota se GKS, ada banyak kawasan industri yang direncanakan di Kawasan GKS. Kebanyakan dari kawasan industri ini adalah terletak pada koridor industri yang ada dan sepanjang Jalan Lingkar dengan radius 20 km dari pusat Kawasan GKS. Jadi, untuk mengakomodasi kawasan-kawasan industri ini, jaringan jalan dan basis logistik yang baik harus dikembangkan dengan baik, bersama-sama dengan infrastruktur dan utilitas lainnya. Secara Khusus persediaan air sangat penting. Ketika industri diperkenalkan di Industri Estate, seperti yang dipertimbangkan oleh Bangkalan, Gresik dan Lamongan, industri berbasis sumber daya lokal, terutama sumber daya pertanian dan perikanan, teknologi lokal dan sumber daya manusia harus dipilih untuk dampak ekonomi yang lebih baik.

4.1.4 Hubungan Perkotaan dan Perdesaan

Daerah pedesaan yang relatif terbelakang di GKS harus diperkuat dengan menghubungkan dengan pusat-pusat dan daerah perkotaan dalam kegiatan sosial-ekonomi. Untuk ini, ada sebuah ide untuk membentuk sebuah hubungan dekat daerah pedesaan secara hirarki, yang membutuhkan jaringan infrastruktur yang efisien.

(1) Memperkuat Pusat Pelayanan Perdesaan

Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur menarik menggambarkan bahwa sistem pedesaan dirumuskan dengan membangun layanan tiga-lapis struktur pusat pelayanan di hirarki pedesaan yang ditunjukkan sebagai berikut (lihat Gambar 4.1.5):

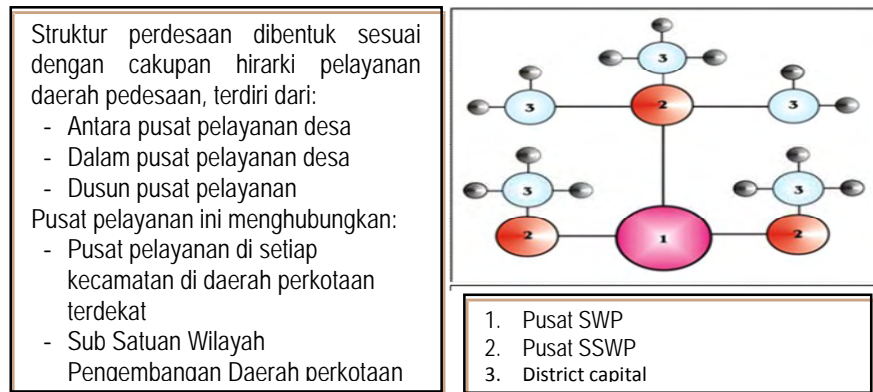
1. Pusat pelayanan antar-desa (PPL)
2. Pusat pelayanan masing-masing desa (PPD)
3. Pusat layanan pada satu atau beberapa dusun atau kelompok permukiman (PPD)

Pusat pelayanan pedesaan pada hirarki yang diinginkan harus memiliki antar-hubungan ekonomi dengan pusat-pusat perkotaan. Struktur ruang pedesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan pusat WP.

(2) Peningkatan Produktivitas Pertanian

Dalam rangka menghidupkan ekonomi pedesaan, tidak hanya menghidupkan sub-sub-pusat, tetapi pengembangan desa juga diperlukan. Untuk tujuan ini, ekonomi Desa yang Dinamis Beragam (3D ekonomi) penting untuk didorong. Untuk mengaktifkan ekonomi pedesaan setempat, kebijakan berikut perlu ditingkatkan:

- Peningkatan koperasi petani
- Penyediaan dukungan keuangan
- Penyediaan informasi dan saran teknis
- Peningkatan produktivitas benih, irigasi, penggunaan pupuk, kegiatan pasca-panen, dll.

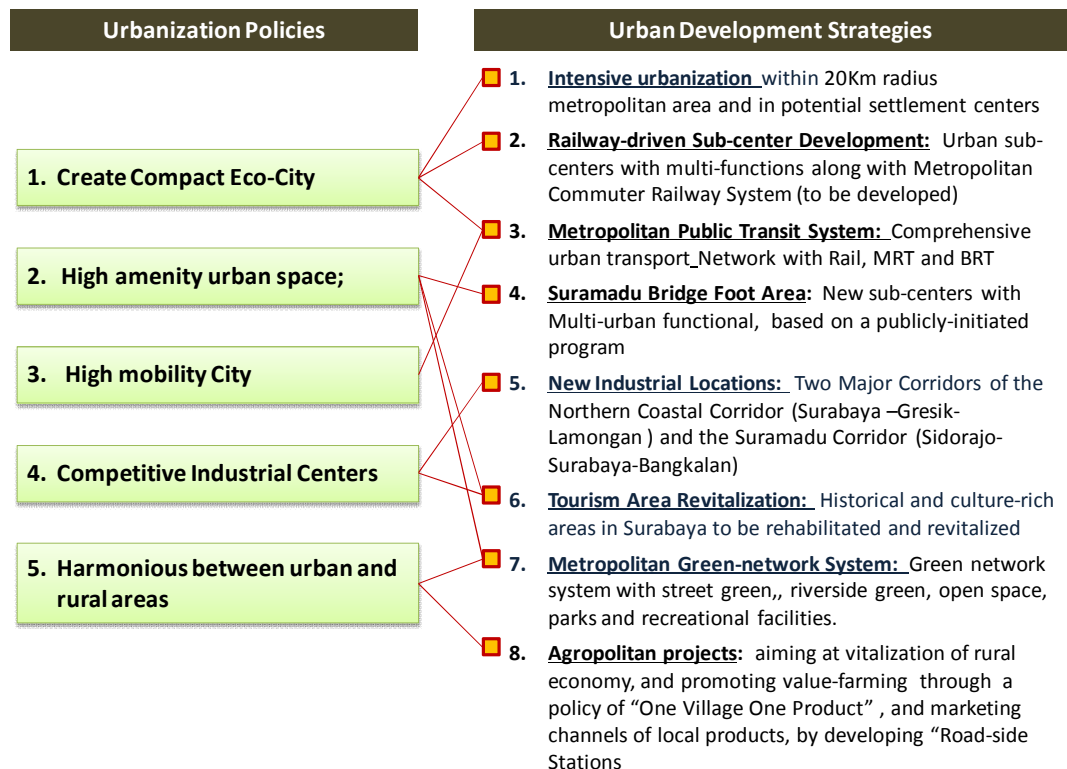


Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur

Gambar. 4.1.5 Konsep Struktur Ruang Pedesaan di Jawa Timur

(3) Diversifikasi Agrobisnis

Selain peningkatan produktivitas pertanian dan pembangunan agroindustri, perlu adanya diversifikasi. Ada dua contoh yang bisa dikutip dari pengalaman diversifikasi agribisnis Jepang. Salah satunya adalah "Satu Desa Satu Produk" dan yang lainnya adalah Sisi Jalan Stasiun (Michi-no-Eki).



Gambar. 4.1.6 Kebijakan Urbanisasi dan Strategi Pembangunan Perkotaan Kawasan GKS

4.2 Jaringan Transportasi

4.2.1 Skenario Permintaan terhadap Transportasi

(1) Kenaikan Kendaraan yang Terdaftar

Jika di asumsikan bahwa jumlah kendaraan yang terdaftar akan meningkat setiap tahunnya dengan jumlah kenaikan seperti ini, maka jumlah total kendaraan yang terdaftar di masa yang akan datang dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.1. Jumlah total sepeda motor yang terdaftar akan menjadi 6 juta, yaitu 2.5 kali dari jumlah yang terdaftar saat ini, dan jumlah mobil penumpang akan menjadi 697 ribu, yaitu sekitar 2 kali dari yang ada saat ini.

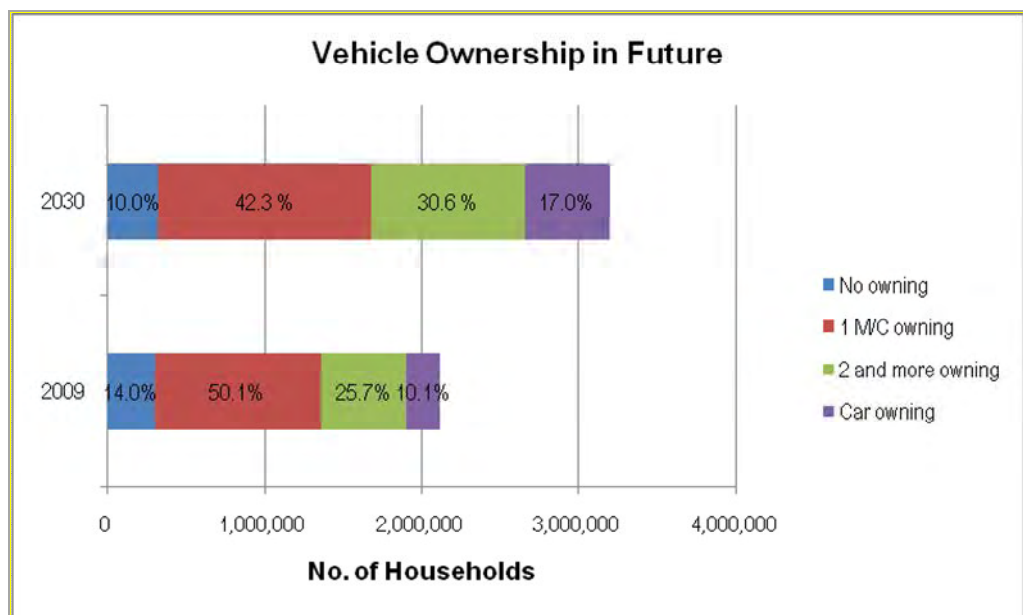
Tabel 4.2.1 Perkiraan Jumlah Kendaraan yang Terdaftar di Masa Depan

Jenis	2009	2010	2020	2030
Mobil Penumpang (000)	366	381	539	697
Tingkat Pertumbuhan (%)	1.0	1.0	1.5	1.9
Sepeda Motor (000)	2,424	2,596	4,308	6,021
Tingkat Pertumbuhan (%)	1.0	1.1	1.8	2.5

Sumber: Tim Studi JICA

(2) Perkiraan Jumlah Kepemilikan Kendaraan pada Rumah Tangga

Komuter survey menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pendapatan dan kepemilikan kendaraan. Distribusi di masa yang akan datang di perkirakan dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dari tiap rumah tangga pada tahun 2030 meningkat sebesar 1.41 kali dari tingkat yang ada saat ini, yang diperoleh dari kenaikan PDRB per kapita. Konsekuensinya, kepemilikan kendaraan di masa yang akan datang mengalami perubahan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.1 sesuai dengan kenaikan tingkat pendapatan rumah tangga, jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan akan menjadi 2.5 kali, yaitu sejumlah 542,000 dan jumlah rumah tangga yang memiliki sepeda motor akan menjadi 1.5 kali.



Sumber: Tim Studi JICA

Gambar. 4.2.1 Perkiraan Kepemilikan Kendaraan di Masa Depan

(3) Ringkasan dari Demand Lalu-lintas di Masa Depan

Pada dasarnya, memperkirakan demand lalu-lintas di masa depan dilakukan dengan menerapkan metodologi empat langkah konvensional; yaitu: *trip production and attraction model*, *trip distribution model*, *modal share model* dan *traffic assignment model*. Ke empat langkah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua; langkah untuk membuat model untuk memperkirakan matriks OD di masa depan dan untuk memperkirakan volume lalu-lintas pada jaringan. Langkah pertama terdiri dari *trip production and attraction model*, *trip distribution model*, dan *modal share model*, dan untuk langkah selanjutnya adalah *traffic assignment model*.

Total Perkiraan Perjalanan di Masa Depan

Langkah pertama dari prosedur memperkirakan adalah dengan mengidentifikasi jumlah total perjalanan yang dilakukan di wilayah studi. Untuk hal tersebut, digunakan nilai perjalanan berdasarkan tujuan perjalanan seperti yang digambarkan pada Tabel 4.2.2. Jumlah perjalanan yang dibangkitkan di GKS adalah **31 juta perjalanan orang** per hari di tahun 2030, yang mana adalah 1.5 kali dari jumlah yang ada saat ini.

Tabel 4.2.2 Perjalanan yang di Estimasikan di Masa Depan

Tujuan Perjalanan	Tingkat Perjalanan	Jumlah Perjalanan (1,000)			
		2009	2010	2020	2030
Ke tempat kerja	0.34	3,154	3,282	4,056	4,764
Ke sekolah	0.26	2,459	2,559	3,162	3,714
Bisnis	0.13	1,226	1,276	1,577	1,852
Pribadi	0.37	3,497	3,639	4,497	5,282
Ke rumah	1.11	10,336	10,756	13,293	15,613
Total	2.21	20,672	21,512	26,587	31,226
Peningkatan (2009=1.0)		1.00	1.04	1.29	1.51

Sumber: Tim Studi JICA

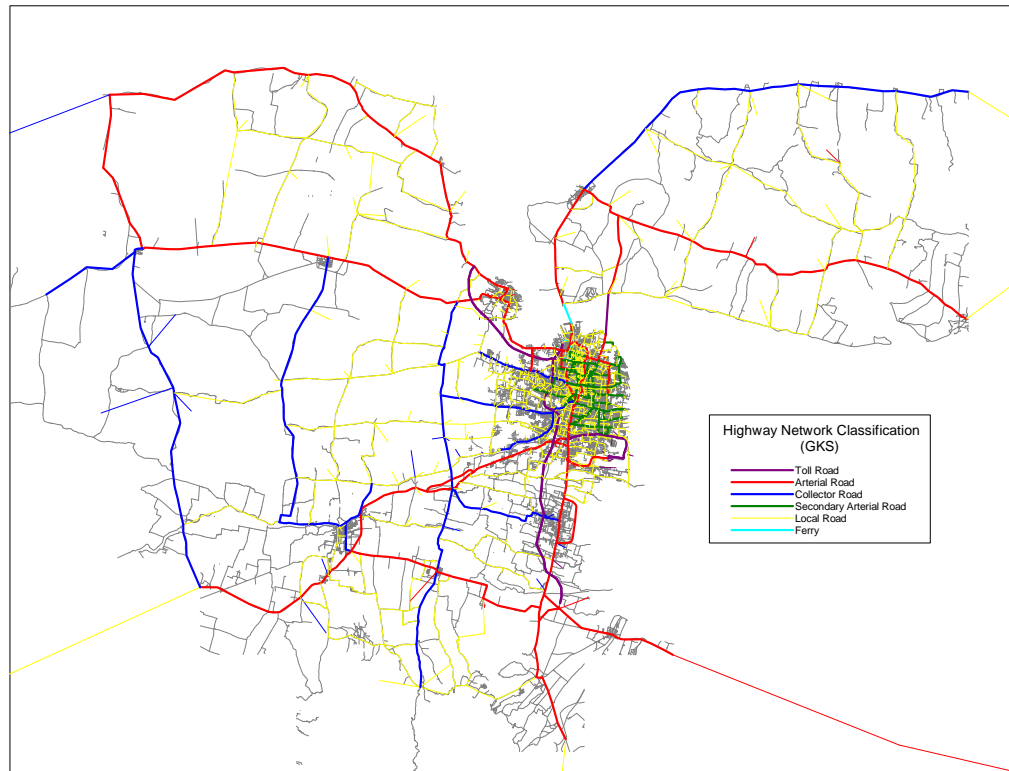
Pengembangan Jaringan Jalan Tahun dasar

Database jaringan yang dikembangkan untuk studi terdiri dari dua kategori: jaringan jalan raya dan jaringan angkutan umum (*transit network*). Jaringan jalan raya terdiri dari simpul-simpul yang mewakili persimpangan atau *junctions* dan *link* yang memiliki simpul-simpul pada kedua ujungnya, yang menggambarkan segmen jalan. Setiap *link* harus memiliki atribut seperti kecepatan perjalanan, panjang *link*, dan kapasitas yang dimungkinkan, dan lain-lain, yang akan digunakan untuk mencari biaya rute minimum pada jaringan. Atribut-atribut tersebut di golongan berdasarkan kelas-kelas fungsional jalan: jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan arteri sekunder, dan jalan lokal. Jaringan jalan untuk dikembangkan merepresentasikan kondisi saat ini (yaitu tahun 2009) atau tahun dasar, seperti pada Gambar 4.2.2.

Meningkatnya Kemacetan pada Jaringan

Ketika *demand* perjalanan, yang disebut dengan matriks OD, di estimasikan dan jaringan dikembangkan, *demand* lalu-lintas pada jaringan tersebut dapat diperkirakan. Bagian ini menunjukkan hasil dari estimasi terhadap kasus-kasus berikut ini:

- **Kasus Tahun Dasar:** menempatkan *demand* perjalanan saat ini pada jaringan jalan raya *base year*. Hal ini akan menjadi dasar bahwa perubahan pada alternatif lainnya dapat di evaluasi.
- **Kasus Do Nothing:** menempatkan *demand* perjalanan masa depan pada jaringan jalan *base year*. Hal ini merupakan kasus imajiner, yang dapat menghasilkan implikasi langsung mengenai kebutuhan pembangunan jalan dan perbaikannya untuk memenuhi *demand* di masa yang akan datang.



Sumber: Tim Study JICA

Gambar. 4.2.2 Jaringan pada Tahun Dasar untuk Pemodelan Permintaan (Kota Surabaya)

Gambar 4.2.3 menunjukkan hasilnya. Apabila tidak ada tindakan (*Do Nothing Case*) yang dilakukan, konsentrasi lalu-lintas dengan rasio kapasitas volume lebih dari 1.5 diperkirakan akan terjadi di sejumlah besar jalan yang menghubungkan pusat kota Surabaya dan wilayah pinggiran kota.